



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH
(L A K I P)
TAHUN 2014**

KABUPATEN PURBALINGGA

2015

KATA PENGANTAR

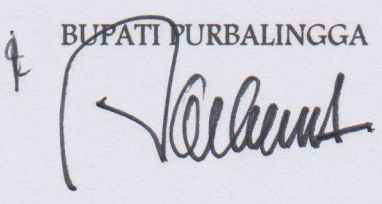
Dengan niat yang tulus, segala bentuk kebijakan, program dan kegiatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dengan harapan semoga gerak langkah kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada terhingga bagi kita semua.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Purbalingga 2010-2015, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan misi yang ditetapkan secara konsisten dengan mewujudkan Visi ***Purbalingga Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berakhlak Mulia***, sebagaimana dalam Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 yang menggambarkan kinerja selama satu tahun dan sebagai kesinambungan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 ini sebagai perwujudan prinsip pemerintahan yang baik, yakni bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah dan publik secara transparan.

Semoga Laporan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 ini benar-benar cermin kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan menjadi momentum untuk mengevaluasi diri guna meningkatkan kinerja ke depan yang lebih baik, berkualitas, produktif, efisien dan efektif. Semoga Allah SWT meridloi usaha luhur kita, Amin.

Purbalingga, 30 Maret 2015



BUPATI PURBALINGGA

Drs. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah	2
	C. Sistematika	5
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
	A. Perencanaan Strategis (RPJMD) 2010 - 2015	7
	1. Visi	7
	2. Misi	7
	B. Tujuan	8
	C. Penetapan Kinerja	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	24
	B. Akuntabilitas Keuangan	126
BAB IV	PENUTUP	142
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014	10
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS Tahun 2014	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Tahun 2014	25
Tabel 3.3	Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Tahun 2014	26
Tabel 3.4	Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014.....	28
Tabel 3.5	Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik Tahun 2014	29
Tabel 3.6	Terwujudnya website <i>e-procurement</i> Tahun 2014	29
Tabel 3.7	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu Tahun 2014.....	30
Tabel 3.8	Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah Tahun 2014.....	31
Tabel 3.9	Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat Tahun 2014	32
Tabel 3.10	Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian Tahun 2014	33
Tabel 3.11	Menurunnya angka kriminalitas Tahun 2014	34
Tabel 3.12	Menurunnya angka pelanggaran Perda Tahun 2014	35
Tabel 3.13	Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat Tahun 2014	35
Tabel 3.14	Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat Tahun 2014.....	37
Tabel 3.15	Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat Tahun 2014...	38
Tabel 3.16	Menurunnya kasus trafficking Tahun 2014	38
Tabel 3.17	Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi Tahun 2014.....	39
Tabel 3.18	Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat Tahun 2014	40

Tabel 3.19	Capaian Kinerja Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah Tahun 2014	41
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD Tahun 2014.....	42
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Penetapan APBD tepat waktu Tahun 2014	43
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014.....	43
Tabel 3.23	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga	44
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2014	45
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera Tahun 2014	46
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Tahun 2014	48
Tabel 3.27	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.....	49
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera Tahun 2014	50
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Meningkatnya usia harapan hidup Tahun 2014.....	51
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Menurunnya angka kematian bayi Tahun 2014.....	52
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Menurunnya angka kematian ibu melahirkan Tahun 2014	53
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Menurunnya presentase gizi kurang Tahun 2014	54
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Menurunnya presentase gizi buruk Tahun 2014	55
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Meningkatnya pemberian asi eksklusif Tahun 2014	56
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Tahun 2014	57
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Meningkatnya Angka melek huruf Tahun 2014	58
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Meningkatnya rata-rata lama sekolah Tahun 2014	59
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Meningkatnya angka partisipasi sekolah Tahun 2014	60
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Meningkatnya indeks pembangunan gender Tahun 2014	61
Tabel 3.40	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga.....	63
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur Tahun 2014	64

Tabel 3.42	Capaian Kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2014	65
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Tahun 2014	66
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani Tahun 2014	67
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Menurunnya jumlah rumah tangga miskin Tahun 2014	68
Tabel 3.46	Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 – 2013.....	68
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Menurunnya angka kasus kenakalan remaja Tahun 2014	69
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras Tahun 2014	70
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif Tahun 2014	71
Tabel 3.50	Capaian Kinerja Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan Tahun 2014	72
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat Tahun 2014	73
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional Tahun 2014	73
Tabel 3.53	Capaian Kinerja Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional Tahun 2014	74
Tabel 3.54	Capaian Kinerja Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional Tahun 2014	75
Tabel 3.55	Capaian Kinerja Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama Tahun 2014	76
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Stabilnya angka inflasi Tahun 2014	77
Tabel 3.57	Inflasi (<i>Year on Year</i>) Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2013.....	78
Tabel 3.58	Capaian Kinerja Meningkatnya daya beli masyarakat Tahun 2014.....	78
Tabel 3.59	Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar Tahun 2014	79
Tabel 3.60	Capaian Kinerja Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) Tahun 2014.....	80

Tabel 3.61	Capaian Kinerja Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) Tahun 2014.....	81
Tabel 3.62	Capaian Kinerja Meningkatnya pendapatan per kapita Tahun 2014.....	83
Tabel 3.63	Capaian Kinerja Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini) Tahun 2014	84
Tabel 3.64	Capaian Kinerja Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson) Tahun 2014.....	85
Tabel 3.65	Indeks Ketimpangan Regional.....	86
Tabel 3.66	Capaian Kinerja Menurunnya angka pengangguran Tahun 2014	86
Tabel 3.67	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2012	87
Tabel 3.68	Capaian Kinerja Menurunnya angka kemiskinan Tahun 2014	88
Tabel 3.69	Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 – 2013.....	89
Tabel 3.70	Capaian Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani Tahun 2014.....	90
Tabel 3.71	Capaian indikator Meningkatnya investasi di sektor agribisnis Tahun 2014	91
Tabel 3.72	Capaian indikator Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian Tahun 2014.....	91
Tabel 3.73	Capaian Indikator Meningkatnya angka kunjungan wisata Tahun 2014	93
Tabel 3.74	Capaian indikator Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) Tahun 2014	94
Tabel 3.75	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) Tahun 2014	95
Tabel 3.76	Capaian indikator Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB Tahun 2014	96
Tabel 3.77	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) Tahun 2014	97
Tabel 3.78	Capaian Indikator Meningkatnya jumlah industri kecil Tahun 2014	98
Tabel 3.79	Capaian Meningkatnya jumlah PMA Tahun 2014	99
Tabel 3.80	Capaian indikator Meningkatnya nilai investasi PMA Tahun 2014.....	99
Tabel 3.81	Capaian indikator Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten Tahun 2014	100

Tabel 3.82	Capaian indikator Menurunnya angka pengangguran Tahun 2014.....	101
Tabel 3.83	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2012	102
Tabel 3.84	Capaian indikator Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal Tahun 2014	103
Tabel 3.85	Capaian indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2014	104
Tabel 3.86	Capaian indikator Panjang jembatan Tahun 2014	105
Tabel 3.87	Capaian indikator Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis Tahun 2014.....	106
Tabel 3.88	Capaian indikator Jumlah prasarana pelayanan kesehatan Tahun 2014	107
Tabel 3.89	Capaian indikator Jumlah prasarana pelayanan pendidikan Tahun 2014	108
Tabel 3.90	Capaian indikator Jumlah pasar tradisional Tahun 2014.....	108
Tabel 3.91	Capaian indikator Menurunnya luasan kawasan kumuh Tahun 2014 .	109
Tabel 3.92	Capaian indikator Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2014	109
Tabel 3.93	Capaian indikator Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Tahun 2014	110
Tabel 3.94	Capaian indikator Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Tahun 2014	111
Tabel 3.95	Capaian indikator Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan Tahun 2014	112
Tabel 3.96	Capaian indikator Meningkatnya cakupan layanan persampahan Tahun 20143	113
Tabel 3.97	Capaian indikator Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Tahun 2014	114
Tabel 3.98	Capaian indikator Meningkatnya rasio elektrifikasi Tahun 2014.....	114
Tabel 3.99	Capaian indikator Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar Tahun 2014	115
Tabel 3.100	Capaian indikator Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi Tahun 2014	117
Tabel 3.101	Capaian indikator Jumlah warung internet Tahun 2014	117

Tabel 3.102	Capaian indikator Jumlah hot spot area Tahun 2014	118
Tabel 3.103	Capaian indikator Jumlah jenis pelayanan publik secara online Tahun 2014	119
Tabel 3.104	Capaian indikator Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika Tahun 2014	120
Tabel 3.105	Capaian indikator Menurunnya luas lahan kritis Tahun 2014.....	121
Tabel 3.106	Capaian indikator Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah Tahun 2014.	121
Tabel 3.107	Capaian indikator Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index) Tahun 2014	126
Tabel 3.108	Capaian indikator Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup Tahun 2014.....	127
Tabel 3.109	Capaian indikator Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL) Tahun 2014...	128
Tabel 3.110	Capaian indikator Meningkatnya kelompok peduli lingkungan Tahun 2014	129
Tabel 3.111	Capaian indikator Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin Tahun 2014	131
Tabel 3.112	Capaian indikator Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan Tahun 2014	132
Tabel 3.113	Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Tahun 2014.....	132
Tabel 3.114	Matrik Capaian Kinerja	135
Tabel 3.115	Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2014.....	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga	2
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2012.....	45
Gambar 3.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012	46
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup dengan provinsi dan Nasional	52
Gambar 3.4	Perbandingan capaian balita gizi buruk provinsi	56
Gambar 3.5	Perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional	59
Gambar 3.6	Perbandingan angka partisipasi sekolah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional	61
Gambar 3.7	Perbandingan indeks pembangunan gender Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional	62
Gambar 3.8	Perbandingan indeks Pemberdayaan gender Jawa Tengah dan Nasional.....	63
Gambar 3.9	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012.....	64
Gambar 3.10	Grafik Peringkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa tengah.....	87
Gambar 3.11	Grafik Peringkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa tengah	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

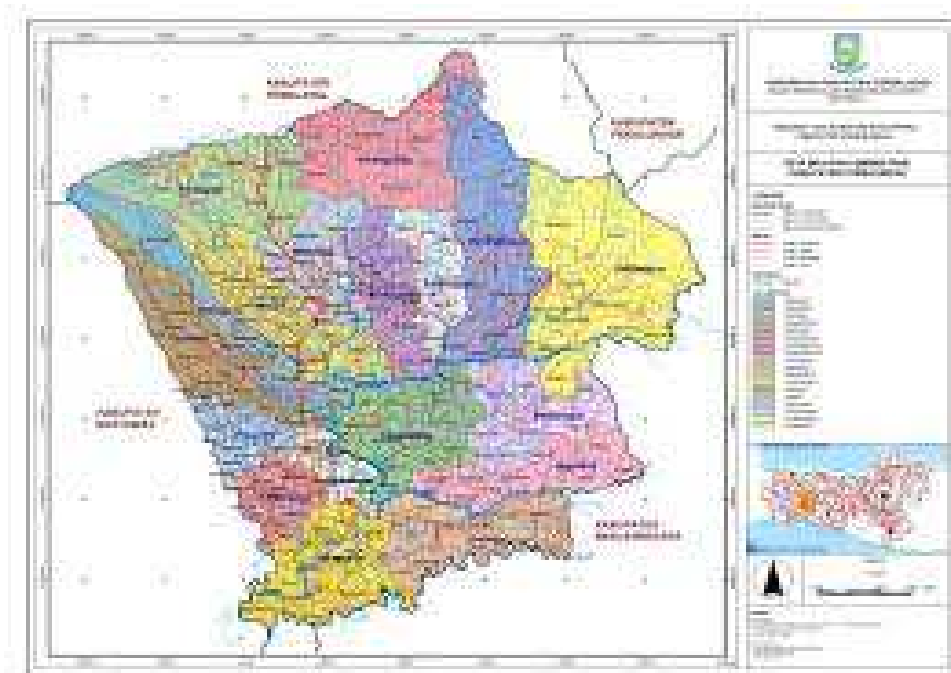
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga lahir pada tanggal 18 Desember 1030 atau hari Sabtu Legi tanggal 3 Rajab tahun 1246 Hijriyah. Kabupaten Purbalingga yang terletak di Karsidenan Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan, serta berada di antara beberapa rangkaian pegunungan dan aliran sungai. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan Gunung Slamet, Dataran Tinggi Dieng dan bagian selatan merupakan depresi aliran Sungai Serayu. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa, 15 Kelurahan, 886 Dusun, 1.530 RW dan 4.968 RT dengan jumlah penduduknya sebanyak 927.978 jiwa yang terbagi atas 470.804 jiwa penduduk laki-laki atau 50,73% dan 457.174 penduduk perempuan atau 49,27%.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good Governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Purbalingga.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Purbalingga terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga



B. KONDISI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang secara operasional telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menata ulang kelembagaan perangkat daerah yang ada

menyesuaikan peraturan perundang-undangan dimaksud. Bentuk dari tindak lanjut tersebut diterbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga
4. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga
5. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan responsive terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, setelah berjalan satu tahun, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan evaluasi terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ada dengan menggabungkan beberapa fungsi baik dalam skala satuan organisasi maupun skala sub organisasi. Dari hasil kajian evaluasi ini diterbitkan :

1. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga
4. Perda Kabupaten Purbalingga nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga.

Untuk membentuk postur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif (*rightsizing*) mengikuti perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, pada tahun 2012 dilakukan evaluasi beberapa SKPD yaitu :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dikembangkan dari 4 (empat) bidang menjadi 5 (lima) bidang seiring penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, melalui penerbitan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Kantor Lingkungan Hidup

Dalam rangka efektifitas dan merespon dinamika kehidupan masyarakat, diperlukan adanya peningkatan kapasitas Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, yang dilegalisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. UPTD Panti Nugroho

Peningkatan kapasitas dari UPTD menjadi Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah (RSKBD) Panti Nugroho melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
3. Dinas Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Perhubungan dan kominfo
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - h. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
 - i. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
 - j. Dinas Peternakan dan Perikanan
 - k. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

4. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain :
 - a. Inspektorat
 - b. BKD
 - c. Bappeda
 - d. BKBPP
 - e. BPPKP
 - f. Bapermasdes
 - g. Badan Lingkungan Hidup
 - h. RSUD
 - i. RSKBD
 - j. Set/Lakhar BPBD
 - k. KPMPT
 - l. Kesbangpol
 - m. Satpol PP
 - n. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Kecamatan (18 Kecamatan);
6. Kelurahan (15 Kelurahan).

C. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang dan landasan hukum penyusunan pelaporan kinerja, serta gambaran umum Kabupaten Purbalingga serta pengantar lainnya.

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2014.

A. Rencana Strategis

Menyajikan secara singkat mengenai rencana strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) Tahun 2010-2015 yang meliputi visi

misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program serta kegiatan yang direncanakan.

B. Penetapan Kinerja

Menyajikan target-target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis sudah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2014.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan, serta menyajikan akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dan singkat tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani
2. Daftar Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RPJMD 2010–2015)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 untuk tahap 5 (lima) tahun kedua. Oleh karena itu Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2015 harus selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025.

1. Visi

“ Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”

2. Misi

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
- b. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum;
- c. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme;
- d. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkatkan dan Berkeadilan;
- e. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
- f. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

RPJP Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga tahap II Tahun 2010–2015 ditekankan pada upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang semakin berkualitas, memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang ditunjang penyediaan berbagai prasarana sosial ekonomi yang

semakin meningkat kapasitas dan kualitasnya, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien; transparan; akuntabel; memiliki strategi yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang dengan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat serta pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM); mewujudkan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi; serta mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia sehingga akan meningkatkan akselerasi pembangunan;
3. Mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatkan partisipasi politik rakyat, serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kualitas intelektual; terwujudnya kesetaraan gender; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; berkembangnya semangat gotong royong; serta semangat dan wawasan kebangsaan sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan social;

5. Memantapkan jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga yang tercermin pada berkembang dan meningkatnya apresiasi terhadap budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa;
6. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga;
7. Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; meningkatkan peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan;
8. menyediakan infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi secara merata di seluruh wilayah, sehingga mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, meliputi jalan dan jembatan, prasarana perhubungan, irigasi, permukiman, kelistrikan, dan telematika sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata;
9. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat; memelihara kekayaan keragaman sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam, melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi hasil

dan berbasis kinerja. Dalam tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai komitmen dan janji untuk mencapai target kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan targetnya secara realistis untuk setiap indikator kinerja. Target-target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, didasarkan pada kondisi dan ketersediaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan potensi daerah.

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
1	Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	o Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.	10 kasus (100% tertangani)
		o Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Baik (76)
		o Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor	379 temuan
2	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien, serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.	o Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	14
		o Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik.	6 (enam) SKPD
		o Terwujudnya website e-procurement	100%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
3	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.	o Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu	
		▪ Revisi RTRW	Ada
		▪ RPJM	Ada
		▪ Dokumen Perencanaan Tahunan	Ada dan tepat waktu
		o Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.	100%
o Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan manfaat.	1610 kegiatan		
o Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian	WTP		
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang	o Menurunnya Angka kriminalitas	0,008%
		o Menurunnya angka pelanggaran perda	500 kasus
		o Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	34 kasus

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
5	Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatinya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM).	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat o Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat o Menurunnya kasus <i>trafficking</i> 	<p>166</p> <p>27</p> <p>2</p>
6	Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> o Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi o Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat 	<p>0</p> <p>Tidak ada</p>
7	Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta	<ul style="list-style-type: none"> o <u>Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati</u> 	<p>Pileg dan Pilpres 70%</p>

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
	meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	o Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD	Tidak ada Raperda Prakasa
		o Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu
8	Meningkatnya kualitas manusia secara umum	o Indeks Pembangunan Manusia	73,54
		o Indeks Pembangunan Gender	65,02
9	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.	o Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera	73.420 KK
		o Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	0,62%
		o Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	150.010
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,	o Meningkatnya usia harapan hidup	70,4
		o Menurunnya angka kematian bayi	9/1.000 KH
		o Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	100/100.000 KH
		o Menurunnya presentase gizi kurang	2,2%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
		o Menurunnya presentase gizi buruk	0,05%
		o Meningkatnya pemberian asi eksklusif	78%
		o Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100%
11	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	o Meningkatnya Angka melek huruf	93,70%
		o Meningkatnya rata-rata lama sekolah	7.50%
		o Meningkatnya angka partisipasi sekolah	
		- APM SD/MI/PAKET A	95%
		- APM SMP/MTs/PAKET B	76%
		- APM SMA/SMK/MA/PAKET C	43%
12	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	o Meningkatnya indeks pembangunan gender	65,88
		o Meningkatnya indeks pemberdayaan gender	64,1
		o Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur	0
		o Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	7
		o Menurunnya kasus	10

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
		kekerasan terhadap anak	
13	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani o Menurunnya jumlah rumah tangga miskin 	<p style="text-align: center;">3%</p> <p style="text-align: center;">20,19</p>
14	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> o Menurunnya angka kasus kenakalan remaja o Menurunnya kasus penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA) o Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif o Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan o Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat 	<p style="text-align: center;">4 kasus</p> <p style="text-align: center;">50 kasus</p> <p style="text-align: center;">140 organisasi</p> <p style="text-align: center;">60.000 orang</p> <p style="text-align: center;">0</p>

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
15	Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga	o Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional	275
		o Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional	23 kali
		o Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	10 kegiatan
		o Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama	Etnis 4 kali Agama 8 kali
16	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.	o Stabilnya angka inflasi	5-6%
		o Meningkatnya daya beli masyarakat (PPP)	Rp. 640.000,-
		o Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar	160 sampel
		o Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun)	177.891 kg/kapita/th
		o Meningkatnya indeks konsumsi non pangan	45,45%
17	Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.	o Meningkatnya pendapatan per kapita	Rp. 6 Juta/ th
		o Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini)	0,26
		o Menurunnya kesenjangan	0,49

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
		ekonomi antar wilayah (indek Williamson)	
		o Menurunnya angka pengangguran	4500 orang
		o Menurunnya angka kemiskinan	19,59%
18	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.	o Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani.	110
		o Meningkatnya investasi di sektor agribisnis	8%
		o Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian	10%
		o Meningkatnya angka kunjungan wisata	1.600.000
		o Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB sektor hotel dan restoran)	17%
		o Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB	1,5%
		o Meningkatnya jumlah industri kecil	40.000 industri

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
19	Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan	o Meningkatnya jumlah PMA	26 perusahaan
		o Meningkatnya nilai investasi PMA	Rp. 29,581.601.000
		o Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.023.000,-
		o Menurunnya angka pengangguran	4.500 orang
20	Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi	o Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal	703,354 km (99,03%)
		o Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	521,558 (73,44%)
		o Panjang jembatan	2.746,8 m
		o Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis	11.232,68 ha 3.640,576 ha
		o Jumlah prasarana pelayanan kesehatan	PKD 204, Pustu 49, Puskesmas 22 unit
		o Jumlah prasarana pelayanan pendidikan	Ruang kelas SD/ MI 4477, SMP/ MTs 1408, SMA/SMK/MA 805 ruang kelas
		o Jumlah pasar tradisional	19

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
21	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	o Menurunnya luasan kawasan kumuh	Tidak ada
		o Menurunnya persentase rumah tidak layak huni	4,4%
		o Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	80%
		o Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih	100%
		o Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan	46.749 SR
		o Meningkatnya cakupan layanan persampahan	$\frac{154 \text{ m}^3/\text{hr}}{195,63 \text{ m}^3/\text{hr}}$
		o Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,16 m ³ /penduduk
22	Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi	o Meningkatnya rasio elektrifikasi	98,45%
		o Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar	Menurun
23	Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.	o Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi	0
		o Jumlah warung internet	106
		o Jumlah hot spot area di ruang publik	16
		o Jumlah jenis pelayanan publik secara online	29 (1 Website Purbalingga, 26

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
1	2	3	6
			sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE)
		o Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika	100%
24	Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat	o Menurunnya luas lahan kritis	
		▪ Persentase lahan kritis di kawasan lindung	5%
		▪ Presentase Lahan kritis di kawasan budidaya pertanian	5%
		o Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah	Udara : (100%) Air : (100%) Tanah 0%
25	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.	o Terjaganya keragaman hayati (<i>biodiversity index</i>)	100%
		o Jumlah kasus dan persentase penegakan pelanggaran perusakan lingkungan hidup	100%
26	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya	o Jumlah dan persentase perusahaan wajib AMDAL yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS (Perda 6/2011)	INDIKATOR KINERJA (Perda 6/2011)	Target 2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
	alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.	(AMDAL, UKL, UPL)	
		o Meningkatnya kelompok peduli lingkungan	14 Kelompok
		o Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin	Menurun 3,13%
		o Menurunnya kasus pencurian kayu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalinga dalam memberikan pertanggungjawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2014 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang diukur melalui formulir Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 53 Tahun 2014.

A. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka diperlukan evaluasi akuntabilitas kinerja sektor publik secara periodik. Meskipun evaluasi akuntabilitas dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan *Self assessment*, setidaknya-tidaknya memberikan gambaran kondisi kinerja

yang dapat digunakan sebagai data pengawasan/pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja.

Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah pelaporan pencapaian target-target dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 untuk tahun keempat yang diukur dengan indikator-indikator kinerja yang bersifat *outcome* (utamanya) yang telah disusun berdasarkan arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam program-program kegiatan-kegiatan sesuai sumber daya input dan potensi serta kemampuan daerah.

Mendasarkan kepada ruang lingkup evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja tersebut, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dapat dikemukakan sebagai berikut yang dikelompokkan berdasarkan misi yang ingin diwujudkan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 yang membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Misi Pertama **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “**

Sasaran Pertama : Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

a. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.

Realisasi indikator kinerja Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2014 sebesar 10 kasus atau 100 % dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut sama dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 10 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 100% tertangani. Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.	- Hukuman Disiplin tingkat berat = 14 org - Hukuman Disiplin rendah berat = 9 org	- Hukuman Disiplin tingkat berat = 9 org - Hukuman Disiplin tingkat sedang = 1 org	Hukuman Disiplin tingkat berat sebanyak 10 orang	10 Kasus (100% tertangani)	10 kasus (100% tertangani)	100

Realisasi tahun 2011 jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani sebanyak 23 kasus (hukuman disiplin tingkat berat sebanyak 14 orang dan disiplin sedang sebanyak 9 orang) sedangkan jumlah kasus pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu yang tertangani 10 kasus (hukuman disiplin tingkat berat sebanyak 9 orang dan disiplin sedang sebanyak 1 orang) mengalami penurunan yaitu sebanyak 13 kasus atau sebesar 56,52% dan selanjutnya jika dibandingkan tahun 2013 jumlah kasus yang tertangani mencapai sebanyak 10 kasus. Realisasi tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 . Diharapkan pada akhir RPJMD di tahun 2015 dari kasus-kasus yang ada juga dapat terselesaikan 100%

Konsistensi terhadap disiplin pegawai merupakan unsur penting dalam menjaga kinerja profesionalisme pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Citra PNS khususnya PNS yang saat ini memiliki etos kerja rendah maka berujung pada tingkat disiplin yang rendah pula. Untuk itu dengan upaya pemberian sanksi terhadap para pegawai yang melanggar peraturan dapat dijadikan indikator konsistensi terhadap penegakan disiplin pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian adalah cukup kompleks, sehingga diperlukan adanya kesiapan aparatur pelaksananya. Untuk mengatasinya maka diperlukan

fasilitasi kepegawaian untuk meningkatkan koordinasi kerjasama dan pada tahun 2014 sudah dilaksanakan pada 40 SKPD.

b. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Realisasi indikator kinerja Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2014 adalah Baik (74,37) atau 97,84% dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut menurun dibandingkan dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar Baik (76). Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat. Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Baik (74)	Baik (74)	Baik (76)	Baik (76)	Baik (74)	97,85

Realisasi tahun 2011 indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik adalah dalam kategori Baik dengan nilai 74. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2012 dengan kategori baik dengan nilai 74. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat 2 poin dengan kategori baik dengan nilai 76. Diharapkan pada akhir RPJMD di tahun 2015 indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik adalah meningkat setiap tahunnya.

Perbandingan capaian Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2013 terhadap target akhir 2013 sebesar 100%. Oleh karena itu kinerja Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik selalu dikur oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat setiap tahunnya. Nilai IKM pada Tahun 2013 diperoleh dari nilai rata-rata seluruh SKPD pemberi pelayanan. Sedangkan nilai IKM tahun 2014 diperoleh dari hasil survei

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap SKPD pemberi layanan.

c. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor.

Realisasi indikator kinerja Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor tahun 2014 sebesar 346 temuan atau 109,45 % dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut lebih baik dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 505 temuan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun tiap tahunnya.

Tabel 3.3 Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor	506 temuan	534 temuan	505 temuan	379 temuan	346 temuan	109,54

Realisasi tahun 2011 Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor adalah 506 temuan sedangkan jumlah temuan pada tahun 2012 Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor adalah 534 temuan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 107 temuan atau sebesar 24,65%. Realisasi tahun 2013 jumlah Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor adalah 505 temuan. Realisasi tahun 2013 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebanyak 29 temuan. Sedangkan realisasi tahun 2014 sebanyak 346 temuan. Diharapkan pada akhir RPJMD di tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan antara lain :

1. Objek pemeriksaan atau entitas belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif.
2. Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Obyek pemeriksaan atau entitas agar melaksanakan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar.
2. Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan mengacu pada Standar akuntansi Pemerintah (SAP).

Sasaran kedua : Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.

a. Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2014 sebesar tidak ada atau 100% dari target yang ditentukan.

SPM bidang dasar sudah seluruhnya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012, sebanyak 12 bidang dasar yang diampu oleh :

1. Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
2. Bidang Pendidikan Dasar oleh Dinas Pendidikan;
3. Bidang Ketenagakerjaan oleh Dinsosnakertrans;
4. Bidang Sosial oleh Dinsosnakertrans;
5. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh BPBD, Satpol PP dan Dinpendukcapil;
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh BKBPP;
7. Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan oleh BKBPP;
8. Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang oleh DPU;
9. Bidang Perumahan Rakyat oleh Bappeda;
10. Bidang Ketahanan Pangan oleh BPPKP;
11. Bidang Kesenian oleh Dinbudparpora;
12. Bidang Perhubungan oleh Dinhubkominfo;
13. Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Dinhubkominfo;
14. Bidang Lingkungan Hidup oleh BLH.

Sehingga untuk tahun 2014 tidak ada penambahan jumlah SKPD pengampu bidang dasar sebelum ada penambahan bidang dasar dari kementerian pusat.

Tabel 3.4 Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	7	13	13	13	13	100

Realisasi jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2011 adalah 7 SKPD sedangkan pada tahun 2012 adalah 13 SKPD. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 9 SKPD. Realisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masih sama dengan realisasi tahun 2012 karena menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Pada tahun 2015 ditargetkan seluruh SKPD mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- b. Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik tahun 2014 sebesar 1 SKPD atau 16,66% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 6 SKPD. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 8 SKPD. Hal tersebut dikarenakan karena banyaknya SKPD yang kualifikasinya sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi. Banyaknya anggaran yang dipergunakan untuk memperpanjang kualifikasi menyebabkan banyak SKPD untuk tidak memperpanjang hal tersebut.

Tabel 3.5 Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	TARGET 2014	Realisasi 2014	capaian %
Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik	6	6	6	6	1	16,66

Realisasi jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik pada tahun 2011 sebanyak 6 SKPD sedangkan pada tahun 2012 6 SKPD. Realisasi tahun 2013 sebanyak 6 SKPD. Realisasi antara tahun 2011 sampai dengan 2013 tidak berubah. Sedangkan realisasi tahun 2014 adalah 1 SKPD. Diharapkan pada akhir RPJMD di tahun 2015 meningkat setiap tahunnya.

c. Terwujudnya website *e-procurement*.

Realisasi capaian indikator kinerja Terwujudnya website *e-procurement* tahun 2014 sebanyak 1 program yaitu SPSE (Sistem Pengadaan barang dan jasa elektronik) atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 100%.

Tabel 3.6 Terwujudnya website *e-procurement* Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Terwujudnya website <i>e-procurement</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100

Realisasi Terwujudnya Website *E-Procurement* tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah 100%. Sedangkan realisasi tahun 2014 adalah 100%. Realisasi akhir RPJMD sudah terealisasi semenjak tahun 2011.

Penggunaan SPSE tahun 2011 untuk pengadaan barang/ jasa diatas 100 juta, sedangkan tahun 2013 untuk pengadaan barang/ jasa diatas 200 juta. Semua pengadaan barang/ jasa yang melalui penyedia/ swakelola wajib diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Kendala yang dihadapi adalah pada saat lelang yang pelaksanaannya dan pengiriman berkas dari penyedia lelang secara bersama-sama karena waktunya terbatas maka dalam penerimaan akan mengalami keterlambatan.

Sasaran Ketiga : Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu.

Realisasi capaian indikator kinerja Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu tahun 2014 ada dokumen atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar ada dokumen. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah ada dokumen.

Tabel 3.7 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Tersedianya dokumen perencanaan	ada	ada	ada	ada	ada	100

pembangunan dan anggaran tepat waktu						
--	--	--	--	--	--	--

Realisasi dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu pada tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah ada dan tepat waktu. Target akhir RPJMD adalah ada dan tepat waktu.

- b. Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah tahun 2014 adalah 80,28% atau 124,5% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 94,97%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 ditargetkan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.8 Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah	meningkat	90,16%	94,97%	100%	80,28%	124,5

Realisasi indikator Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah pada tahun 2011 adalah meningkat. Realisasi pada tahun 2012 yaitu 90,16% dan realisasi pada tahun 2013 yaitu 94,97%. Pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 4,81%. Capaian tersebut selalu meningkat sampai dengan tahun keempat RPJMD yaitu tahun 2014 sebesar 80,28%. Target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu meningkat setiap tahunnya.

Kegiatan pemerintah daerah tercermin pada kegiatan yang ada pada SKPD. Kegiatan ini ada di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga yaitu Kegiatan Pelaksanaan Rakor POK Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan Rakor POK Kabupaten Purbalingga diadakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan mengundang seluruh SKPD untuk pemaparan hasil progres kegiatan dan mengevaluasi kemajuan fisik kegiatan, baik kegiatan yang sumber dananya berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah, DAK maupun APBD Murni Kabupaten Purbalingga. Sehingga dengan adanya Kegiatan Pelaksanaan Rakor POK Kabupaten Purbalingga bisa terpantau, termonitoring dan terevaluasi apa yang menjadi hambatan dari progress kegiatan yang ada pada masing-masing SKPD dan mencari solusi penyelesaiannya.

c. Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat tahun 2014 adalah 1.820 kegiatan atau 113,04% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 1.556. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.9 Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat	Meningkat	98,86%	1.556 kegiatan	1.610 kegiatan	1.820 kegiatan	113,04

Realisasi indikator Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat pada tahun 2011 adalah meningkat. Pada tahun 2012 yaitu 98,86% dan pada tahun 2013 sebesar 1.556 kegiatan. Adanya peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar 264 kegiatan. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah meningkat setiap tahunnya.

Dasar Laporan yang diinput pada Bagian Pembangunan terdapat 1830 kegiatan dari 171 SKPD dengan jumlah seluruh anggaran sebesar 486.980.124.000,-. Sebelum perubahan dan 556.249.177.000,- setelah perubahan. Anggaran tersebut bersumber dari dana baik dari bantuan keuangan kabupaten/kota dari APBD Propinsi Jawa Tengah TA 2014 sebesar 19.439.855.000,- sebelum perubahan dan 43.577.963.000,- setelah perubahan, Dana DAK sebesar 57.267.330.000 dan sisanya merupakan APBD Murni Kabupaten Purbalingga

d. Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Realisasi capaian indikator kinerja Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2014 WDP atau 75% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar WDP. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah WTP.

Tabel 3.10 Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	75

Realisasi indikator Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah WDP. Untuk target pada akhir RPJMD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini disebabkan BPK RI masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyajikan Laporan Keuangan Daerah

dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Misi Kedua : Sasaran Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sasaran Kesatu : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang.

a. Menurunnya angka kriminalitas.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kriminalitas tahun 2014 sebesar 0,3/10.000 kasus atau 200% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 0,8/10.000. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.11 Menurunnya angka kriminalitas Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka kriminalitas	3/10.000 0	13%	0,8/10.0 00	0,8/10. 000	0,3/10.0 00	200

Realisasi indikator Menurunnya angka kriminalitas pada tahun 2011 sebesar 3/10.000 penduduk. Pada tahun 2012 realisasinya 13% dan pada tahun 2013 sebanyak 0,8/10.000 penduduk. Realisasi tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah menurun setiap tahunnya.

Terciptanya rasa aman dan terwujudnya stabilitas keamanan, ketenteraman, melalui penertiban hukum terhadap ketentuan pidana perda, serta mendukung berbagai aktifitas masyarakat, dan mewujudkan rasa aman guna menekan angka kriminalitas, melalui Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

b. Menurunnya angka pelanggaran perda.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kriminalitas tahun 2014 sebesar 1.440 kasus atau 37,72% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 919 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.12 Menurunnya angka pelanggaran Perda Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka pelanggaran perda	Menurun	735 kasus	919 kasus	500 kasus	1.440 kasus	37,72

Realisasi Menurunnya angka pelanggaran Perda pada tahun 2011 adalah menurun. Realisasi pada tahun 2012 meningkat secara drastis sebanyak 735 kasus. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 919 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat secara drastis menjadi 1.440 kasus. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun.

Satpol PP sudah berupaya untuk melakukan patroli secara berkala untuk menekah kasus tersebut. Akan tetapi kurangnya kerjasama dengan kelompok masyarakat mengakibatkan meningkatnya kasus secara drastis. Kegiatan sosialisasi sudah sering dilakukan.

c. Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat tahun 2014 sebesar 7 kasus atau 100% dari target yang ditentukan.

Tabel 3.13 Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	2 kasus	Menurun 14%	34 kasus	34	7	100

Realisasi indikator Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat pada tahun 2011 adalah 2 kasus. Pada tahun 2012 menurun 14% dan pada tahun 2013 terjadi 34 kasus. Pada tahun 2014 menjadi 7 kasus yang terjadi di masyarakat. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun.

Kasus-kasus tindak kekerasan dan konflik di masyarakat terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang, faktor masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat adalah.

- a. Mengoptimalkan fungsi intelijen yang ada pada masing – masing unsur baik dari TNI, Polri, Kejaksaan dan unsur lainnya yang di koordinasikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- b. Memberikan penyuluhan – penyuluhan masalah hukum melalui forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Etnis, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dan kegiatan – kegiatan lainnya yang dapat menyadarkan masyarakat tentang arti daripada kerukunan sehingga bisa menekan angka tindak kekerasan dan konflik yang ada di masyarakat.

Sasaran Kedua : Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM)

- a. Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat tahun 2014 sebanyak 151 terdiri dari Ormas : 100, LSM : 51 atau 90,96% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibanding tahun 2013 dari capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 166 organisasi. Capaian tahun 2014 sudah mencapai target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 139 organisasi.

Tabel 3.14 Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat	95	139	166 (Ormas : 82, LSM : 46 dan 14 OKP, Yayasan : 24)	166	151 (Ormas : 100, LSM : 51)	90,96

Realisasi indikator Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat pada tahun 2011 sebanyak 95 kelompok masyarakat. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 73 menjadi 139 kelompok. Realisasi tahun 2013 sebanyak 166 kelompok atau meningkat sebesar 27 kelompok. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 15 kelompok menjadi 151 kelompok. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Pada capaian tahun 2012 sebanyak 139 dan meningkat pada tahun 2013. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Ormas diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 dimana Ormas harus berbadan hukum atau mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, dimana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga adalah SKPD yang ditunjuk untuk mengatur, membina Organisasi Masyarakat yang ada di kabupaten dan sekaligus mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas berbadan hukum dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013.

b. Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat tahun 2014 sebanyak 7 kasus atau 70% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013

yaitu sebanyak 27 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.15 Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	2 kasus	31 kasus	27 kasus	Tidak ada kasus	7 kasus	70

Realisasi Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat pada tahun 2011 adalah 2 kasus. Pada tahun 2012 terjadi 31 kasus. Realisasi tahun 2013 menurun 4 kasus menjadi 27 kasus. Sedangkan realisasi pada tahun 2014 terjadi penurunan secara signifikan menjadi 7 kasus. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah menurun.

Data tersebut merupakan kerjasama dari Bagian Hukum dan HAM Setda dengan tim harapan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Angka tersebut tetap belum dapat menggambarkan kasus kekerasan yang sesungguhnya karena tidak semua korban mel;aporkan kepada pelayanan terpadu

c. Menurunnya kasus trafficking.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus trafficking tahun 2014 adalah 1 kasus atau 150% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar tidak ada kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tidak ada kasus trafficking di Purbalingga.

Tabel 3.16 Menurunnya kasus trafficking Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kasus trafficking	0	Tidak ada kasus	2	2	1	150

Realisasi Menurunnya kasus trafficking pada tahun 2011 adalah tidak ada kasus. Paada tahun 2012 tidak ada kasus. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan kasus menjadi 2 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1 kasus. Target kahir yang ditetapkan RPJMD adalah menurun.

Semakin majunya teknologi informasi maka akan berpengaruh pada tingkat pergaulan pada seseorang. Terutama semakin mudahnya mengakses internet khususnya media sosial. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus trafiking yang terjadi di Purbalingga adalah melakukan pendampingan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban, penjemputan dari kasus itu terjadi dan pemulangnya. Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk membentuk Tim Harapan dan sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk mengatasi hal tersebut.

Sasaran Ketiga : Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan

a. Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi.

Realisasi capaian indikator kinerja Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi adalah tidak ada Perda yang kadaluarsa atau 100% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2013 sebanyak 3 perda yang kadaluarsa.

Tabel 3.17 Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai	Tidak ada	Tidak ada	3	0	0	100

dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi						
--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2011 dan 2014 realisasi indikator Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi adalah tidak ada. Realisasi pada tahun 2013 ada 3 Perda. Pada tahun 2014 realisasinya adalah tidak ada. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah tidak ada.

Pada tahun 2014 sudah tidak ada Perda yang kadaluarsa. Itu dikarenakan adanya kegiatan pengawasan Perda. Kegiatan tersebut untuk mengawasi Perda yang sudah kadaluarsa atau ada peraturan terbaru yang lebih tinggi dan harus dibuatkan Perdanya.

b. Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat

Realisasi capaian indikator kinerja Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat tahun 2014 tidak ada yang dibatalkan atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian Tahun 2013 tidak ada yang dibatalkan. Itu disebabkan karena tidak adanya produk hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 3.18 Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100

Realisasi indikator produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu tidak ada. Target akhir RPJMD sudah terealisasi sejak tahun pertama RPJMD yaitu tahun 2011.

Sasaran Keempat : Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

a. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah tahun 2014 adalah Pileg dan Pilpres 70% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tahun 2014 lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu Pilgub sebesar 53,02%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah rata-rata partisipasi masyarakat pada setiap pesta demokrasi adalah 80% dari total pemilih yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah	-	-	Pilgub 59,02%	Pileg dan Pilpres 70%	Pileg dan Pilpres 70%	100

Pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu realisasinya adalah 0 (nol). Pada tahun 2013 di Jawa Tengah mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, realisasinya adalah 59,02% masyarakat di Purbalingga menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada tahun 2014 warga masyarakat Indonesia mengadakan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih

Presiden dan Wakil Presiden dan 70% masyarakat di Purbalingga menggunakan hak pilihnya. Target akhir RPJMD adalah 80% masyarakat di Purbalingga menggunakan hak pilihnya.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga selaku Desk Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula yang melibatkan kurang lebih 200 pemilih pemula dari perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Melaksanakan pemantauan terhadap tahapan – tahapan penyelenggaraan Pemilu, memberikan informasi ataupun penyuluhan terkait pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kesempatan.

b. Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD tahun 2014 yaitu tidak ada Raperda Prakarsa atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dari capaian tahun 2013 yaitu tidak ada Raperda Prakarsa. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah selalu ada pengusulan dari DPRD.

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD	4	Tidak ada Raperda Prakasa	Tidak ada Raperda Prakasa	Tidak ada Raperda Prakasa	Tidak ada Raperda Prakasa	100

Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD pada tahun 2011 adalah 4 Raperda. Sedangkan capaian pada tahun 2012 sampai dengan 2014 yaitu tidak ada reperda prakarsa. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Hal ini disebabkan karena agenda kegiatan DPRD pada tahun 2014 sudah cukup padat. Itu dikarenakan adanya penetapan Ketua DPRD Kab. Purbalingga

menjadi Wakil Bupati Purbalingga yang menggantikan Wakil Bupati Purbalingga yang dilantik menjadi Bupati Purbalingga.

c. Penetapan APBD tepat waktu

Realisasi capaian indikator kinerja Penetapan APBD tepat waktu tahun 2014 sebesar tepat waktu atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar tepat waktu. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tetap waktu.

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Penetapan APBD tepat waktu Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100

Realisasi Capaian Kinerja Penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah tepat waktu. Realisasi ini sudah menapai target akhir RPJMD.

Misi Ketiga . Sasaran Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri Dan Semangat Nasionalisme.

Sasaran Kesatu : Meningkatnya Kualitas Manusia Secara Umum

a. Indeks Pembangunan Manusia

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 sebesar 73,49 atau 101,36% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 72,49%.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	72,07	72,80	72,49	72,5	73,49 (2013)	101,36

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 adalah sebesar 72,07. Pada tahun 2012 realisasinya mengalami kenaikan menjadi 72,80. Tahun 2013 meningkat menjadi 72,97 dan pada tahun 2014 menjadi 73,49. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 74,18.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan dari sebesar 70,89 pada tahun 2008 menjadi 72,97 pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dalam hal pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi.

Tabel 3.23
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga
Tahun 2008 – 2013

Tahun	Nilai IPM
2008	70,89
2009	71,51
2010	72,07
2011	72,5
2012	72,97
2013	73,49

b. Indeks Pembangunan Gender

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2014 sebesar 64,20 atau 98,20% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 64,02%.

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2014

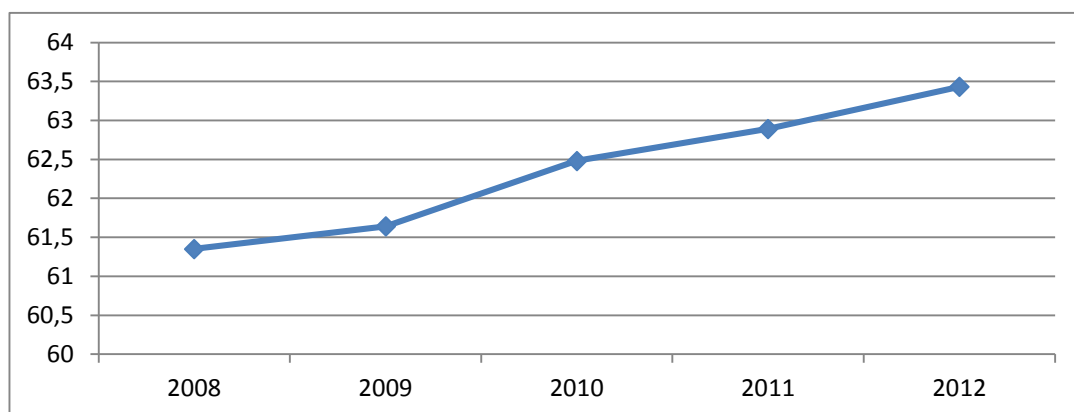
INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	2011	2012	2013	2014	2014	%
Indeks Pembangunan Gender	62,48	62,89	64,88	65,02	64,20	98,73

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 realisasinya adalah 62,48. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 menjadi 62,89. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 64,88. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,68 menjadi 64,20. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah 67.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

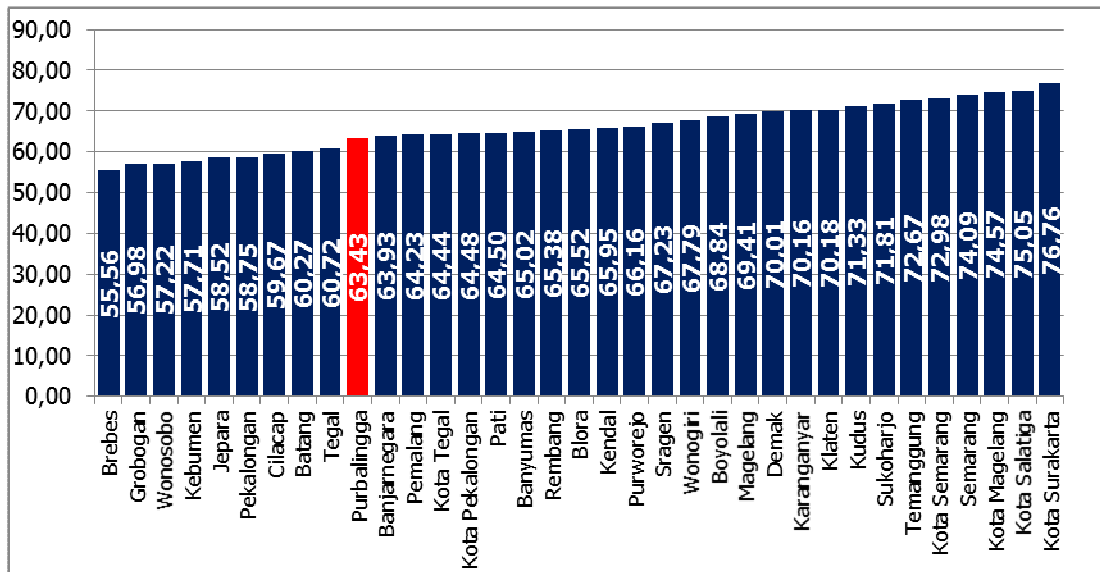
Perkembangan IPG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 61,35 pada tahun 2008 menjadi sebesar 63,43 pada tahun 2012. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2012



IPG Kabupaten Purbalingga menempati peringkat ke-26 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar 3.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BPS

Sasaran kedua : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga

a. Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera tahun 2014 adalah 71.844 KK atau 102,20% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 74.161 KK. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera	74.645 KK	74.811 KK	74.161 KK	73.420 KK	71.844 KK	102,20

Realisasi indikator kinerja Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ketahun mengalami penurunan sesuai apa yang ditargetkan oleh RPJMD. Realisasi pada tahun 2011 adalah 74.645 KK. Pada tahun 2012 menjadi 74.811

KK. Pada tahun 2013 menjadi 74.161 KK dan pada tahun 2014 menurun menjadi 71.844 KK. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun 9% setiap tahunnya.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain belum semua kelompok BKB terintegrasi dengan PAUD dan pelayanan KB melalui kegiatan sosial dengan diberi sembako. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :

1. Mengadakan plesterisasi rumah keluarga pra sejahtera;
2. Meningkatkan kelauargaa pra sejahtera dengan UPPKS;
3. Meningkatkan kepesertaan KB pada keluarga pra sejahtera secara gratis;
4. Mengikutsertakan keluarga pra sejahtera dalam kegiatan BKB terintegrasi dengan posyandu dan PAUD.

b. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya laju pertumbuhan penduduk tahun 2014 adalah 0,32% atau 126,53% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 0,67%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 menurun setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat diukur dengan rumus :

$$LPP = \frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun Lalu} - \text{Jumlah Penduduk tahun ini}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun Lalu}}$$

Tujuannya adalah menekan dan mengendalikan kelahiran melalui alat kontrasepsi dan menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.

Kendala yang dihadapi dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk antara lain :

- 1) Akseptor lebih suka memilih alat kontrasepsi hormonal sehingga pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih rendah.
- 2) Partisipasi laki-laki dalam ber KB masih rendah.
- 3) Masyarakat dan keluarga belum memahami Pendidikan Anak Usia Dini.
- 4) Produktifitas lansia masih dipandang sudah tidak produktif lagi.
- 5) Keluarga remaja masih belum memahami mengenai generasi muda berencana (GENRE).
- 6) Akses modal dan pemasaran dikelompok UPPKS masih rendah.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah :

- 1) Meningkatkan kepesertaan KB;
- 2) Meningkatkan keaktifan peserta KB lama;
- 3) Meningkatkan advokasi dan informasi melalui media massa untuk kelompok perorangan dalam rangka melembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS);
- 4) Melaksanakan program pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kegiatan UPPKS.

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	0,56 %	0,8% 2,14 (BPS)	0,67%	0,62%	0,32%	126,53

Realisasi indikator kinerja Menurunnya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 adalah 0,56% dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,8%. Pada tahun 2013 turun menjadi 0,67% sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi 0,32%. Pada tahun 2014 sudah mencapai target akhir RPJMD. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 0,5%.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2014 sebesar 927.978 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 927.017 jiwa.

Tabel 3.27 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Kemangkön	53.077	54.134	58,094	29.205
Bukateja	66.431	67.784	70,779	72.076
Kejobong	42.831	43.801	47,588	47.743
Pengadegan	35.698	36.464	36,684	37,448
Kaligondang	56.256	57.418	58,341	60.218
Purbalingga	56.384	57.467	57,913	56.691
Kalimanah	50.611	51.899	54,007	52,460
Padamara	39.994	41.245	43.060	42,449
Kutasari	55.679	56.905	56,660	58,346
Bojongsari	56.166	57.528	56.102	56,209
Mrebet	66.327	67.799	73.302	71,683
Bobotsari	47.279	48.282	51.016	51,109
Karangreja	39.854	40.692	43.870	42,892
Karangjambu	23.721	24.318	24.706	24,827
Karanganyar	34.503	35.179	37.428	38,148
Kertanegara	30.380	30.952	33.556	34,799
Karangkoncol	50.339	51.075	55.551	56,619
Rembang	57.861	58.709	68.360	66,855
Jumlah	863.391	881.831	927.017	927,978

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purbalingga

c. Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera tahun 2014 adalah 86.790 atau 57,86% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut turun dari capaian tahun 2012 yaitu sebesar 149.800. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	146.820	146.800	149.800	150.010	86.790	57,86

Realisasi indikator Kinerja Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera pada tahun 2011 sebanyak 146.820. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 146.800. Pada tahun 2013 menjadi 149.800. sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 86.790. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera antara lain :

- 1) Masih belum diterimanya oleh kelompok masyarakat atau golongan tertentu;
- 2) Keikutsertaan masyarakat dalam program ketahanan keluarga masih rendah;
- 3) Informasi pendidikan reproduksi sehat untuk anak dan remaja dipandang masih tabu.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera antara lain :

- 1) Peningkatan kepesertaan KB bagi pasangan usia subur (PUS) melalui MUVAR (Muda Usia Varitas Rendah);
- 2) Mengikutsertakan GENRE bagi remaja dalam rangka menaikan usia kawin pertama;
- 3) Mengikutsertakan keluarga dalam kegiatan BKB, BKR dan BKL;
- 4) Meningkatkan KIE dan advokasi melalui media massa dalam rangka melembagakan NKKBS.

Sasaran Kedua : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

a. Meningkatnya usia harapan hidup.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya usia harapan hidup tahun 2014 sebesar 71,08 atau 100,96 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 70,30. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 70,60.

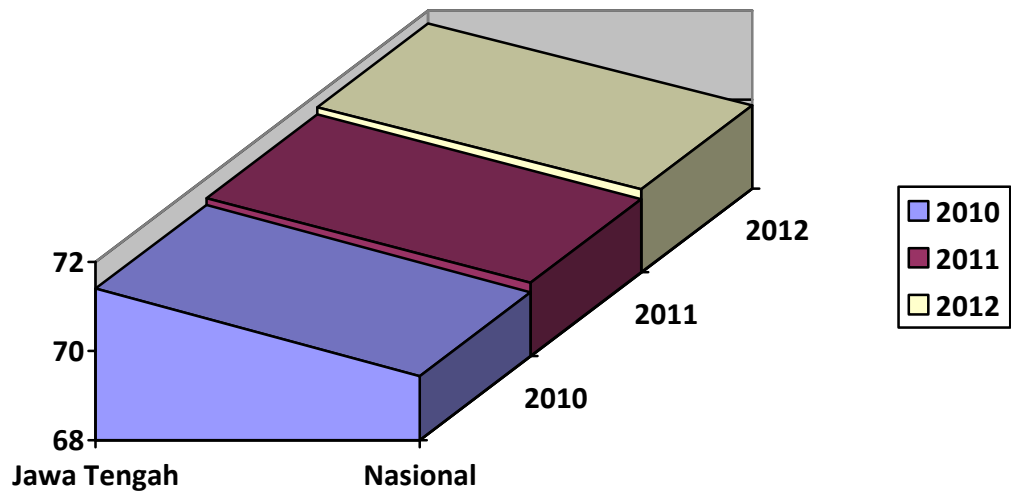
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Meningkatnya usia harapan hidup Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya usia harapan hidup	70,19	70,44	70,30	70,04	71,08	100,96

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 70,19. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 70,44. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi 70,30. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 71,08. Pada tahun 2014 sudah mencapai target akhir RPJMD. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 70,6.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup individu di wilayah kabupaten Purbalingga menunjukkan trend kenaikan dari 70,04 menjadi 71,08 pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan Usia harapan hidup Provinsi Jawa Tengah 72 tahun, maka di kabupaten purbalingga masih dibawah, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka UHH Nasional (65 thn). Peningkatan Usia Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup dengan provinsi dan Nasional



b. Menurunnya angka kematian bayi.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kematian bayi tahun 2014 sebesar 10,9/1.000 KH atau 82,56% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2012 yaitu sebesar 10,9/1.000 KH. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 8/1.000 KH.

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Menurunnya angka kematian bayi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka kematian bayi	10,8/1.000 KH	11/1.000 KH	11,3/1.000 KH	9/1.000 KH	10,9/1.000 KH	82,56

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya angka kematian bayi pada tahun 2011 adalah 10,8/1.000 KH. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 menjadi 11/1.000 KH. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 11,3/1.000 KH. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,9/1.000 KH. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 8/1.000 KH.

Angka kematian bayi merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin rendah angka kematian bayi maka derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi. Angka kematian bayi menunjukkan trend menurun dari 172 kasus (11,30/per 1.000 kelahiran hidup) menjadi 162 kasus (10,90/per 1000 kelahiran hidup). Jika dibandingkan dengan target MDGs 23 per 1000 kelahiran hidup, maka sudah mencapai target. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaiannya adalah faktor akseptabilitas dan tenaga medis terampil. Oleh karena itu upaya yang dilakukan antara lain adanya penyediaan fasilitas sarana kesehatan yang memadai, peningkatan ketrampilan tenaga medis dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kematian ibu melahirkan tahun 2014 sebesar 94/100.000 KH atau 106,38% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 171/100.000 KH. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 102/100.000 KH.

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Menurunnya angka kematian ibu melahirkan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	99,8/100. 000 KH	136/100. 000 KH	171/100. 000 KH	100/100. 000 KH	94/100. 000 KH	106,38

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan, tetapi realisasi tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 adalah 110/100.000 KH. Realisasi tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 136/100.000 KH. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 171/100.000 KH. Pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 94/100.000 KH. Pada tahun 2014 sudah mencapai target akhir RPJMD. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 102/100.000 KH.

Angka kematian ibu melahirkan merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin rendah kematian ibu melahirkan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka kematian ibu melahirkan menunjukkan trend menurun dari 26 kasus (171/100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2014 menjadi 14 kasus (94.47/100.000 kelahiran hidup), jika dibandingkan dengan target MDGs (102 per 100.000 kelahiran hidup) di tahun 2015, maka sudah mencapai target. Masih tingginya kematian ibu melahirkan dikarenakan berbagai hal. Sebagian besar kematian ibu melahirkan disebabkan karena pendarahan *Post Partum*, kompilasi penyakit degenerative dan kehamilan beresiko tinggi. Dinas Kesehatan sudah melakukan beberapa upaya terhadap kasus tersebut diantaranya adalah Refleksi Diskusi Kasus, Penerapan SOP kegawat daruratan obstetric dan monitoring pelayanan ANC serta melakukan konsultasi dengan dokter obsgyn dan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.

d. Menurunnya presentase gizi kurang.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya presentase gizi kurang tahun 2014 sebesar 2,16% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 3,38%.

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Menurunnya presentase gizi kurang Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya presentase gizi kurang	1,12%	1,12%	3,38%	2,2%	2,16%	100

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya presentase gizi kurang pada tahun 2011 dan 2012 adalah 1,12%. Pada tahun 2013 meningkat secara drastis menjadi 3,38% dan tahun 2014 meningkat menjadi 2,16%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun.

Hal ini disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat di Posyandu dan faktor-faktor lain termasuk perilaku dalam deteksi dini tumbuh kembang bayi dan balita. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

adalah dengan program pencegahan dan penanggulangan masalah KEP, AGB, KVA dan kekurangan zat gizi mikro serta kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing desa/ kelurahan oleh kader dan bidan desa. Pemberian penyuluhan dan makanan tambahan pada kegiatan posyandu diharapkan akan menurunkan jumlah anak yang memiliki gizi kurang di Kabupaten Purbalingga.

e. Menurunnya presentase gizi buruk.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya presentase gizi buruk tahun 2014 sebesar 0,12% atau 41,67% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 0,11%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tidak ada kasus gizi buruk di Kabupaten Purbalingga.

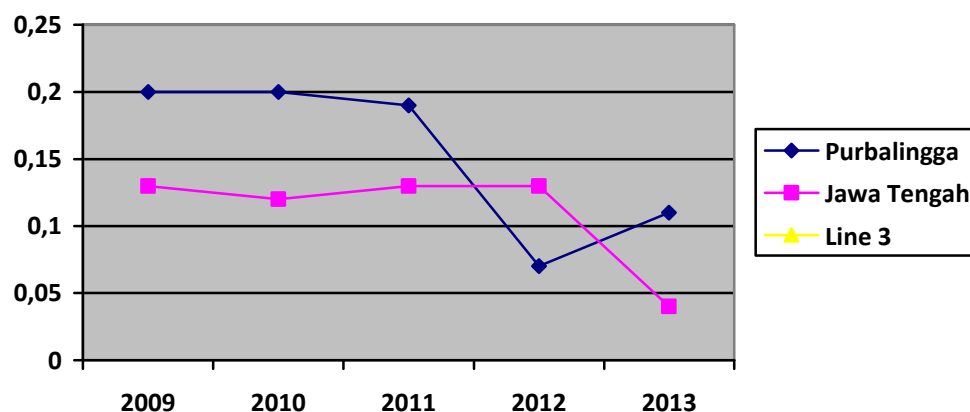
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Menurunnya presentase gizi buruk Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya presentase gizi buruk	0,15%	0,15%	0,11%	0,05%	0,12%	41,67

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya presentase gizi buruk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 dan 2012 adalah 0,15%. Pada tahun 2013 menurun menjadi 0,11%. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,12%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah tidak ada.

Persentasi kasus gizi buruk merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin rendah kasus gizi buruk semakin tinggi derajat kesehatannya. Persentase gizi buruk mencapai 66 kasus (0,12%), jika dibandingkan dengan target MDGs <3% di tahun 2015 maka sudah mencapai target. Upaya yang dilakukan melalui Progran Pemberian Makanan Tambahan serta pemeriksaan yang secara rutin dan ditangani oleh tenaga medis.

Gambar 3.4 Perbandingan capaian balita gizi buruk provinsi



f. Meningkatnya pemberian asi eksklusif.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya pemberian asi eksklusif tahun 2014 sebesar 62,04% atau 73,53% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 58,70%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Meningkatnya pemberian asi eksklusif Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya pemberian asi eksklusif	53,9%	53,90%	58,70%	62,04%	78%	73,53

Realisasi indikator Kinerja Meningkatnya pemberian asi eksklusif pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 53,90%. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 58,70% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 78%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Semakin banyaknya perusahaan di Kabupaten Purbalingga yang para pekerjanya adalah kebanyakan perempuan akan mempengaruhi pemberian asi eksklusif untuk para anak mereka. Mereka akan memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta mengesampingkan akan pentingnya pemberian asi dan menggantinya dengan susu formula. Untuk mengatasi hal tersebut, yang sudah dilakukan adalah akselerasi pemanfaatan ASI dengan peningkatan kesadaran melalui pembinaan kadarzi, gerakan sadar gizi dan revitalisasi posyandu.

g. Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 sebesar 98,82% atau 98,82% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 98,96%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Existing 2012	Existing 2013	TARGET 2014	Capaian 2014	Presentase %
Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	95,2%	95,20%	98,96%	100%	98,82%	98,82

Realisasi indikator kinerja meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah 95,20%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 98,96%. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 menjadi 98,82%. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah meningkat.

Pertolongan persalinan menunjukkan tren positif. Hal ini disebabkan karena pemerintah berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ditematkannya bidan disetiap desa. Disamping itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi mulai meningkat. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, semakin tinggi persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan ditempat pelayanan kesehatan maka akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Capaian petolongan persalinanan tenga kesehatan sudah mencapai 98,82%, jika dibandingkan dengan permenkes 741 tahun 2008 tentang SPM di bidang kesehatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 95% di tahun 2015 maka Kabupaten Purbalingga sudah mencapai target

Sasaran Ketiga : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

a. Meningkatnya Angka melek huruf.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya Angka melek huruf tahun 2014 sebesar 93,78% atau 98,62% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 92,41%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 97%.

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Meningkatnya Angka melek huruf Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya Angka melek huruf	93,48%	N/A	92,41%	93,70%	93,78%	100,09

Realisasi kinerja meningkatnya angka melek huruf pada tahun 2011 sebesar 93,48% dan pada tahun 2012 ini kami tidak bisa mengurnya. Pada tahun 2013 sebesar 92,41% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2012 dan lebih rendah dari pada tahun 2011 sebesar 93,78%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD adalah 97%

Ada program khusus dalam rangka pelestarian angka melek huruf yaitu pemberantasan buta huruf yang dibiayai oleh APBN. Yang harus dirubah adalah usia anak sekolah (7 s.d 18 tahun), upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kejar paket B dan C untuk usia 15 s.d 18 tahun dan membuka SMP Terbuka.

b. Meningkatnya rata-rata lama sekolah.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rata-rata lama sekolah tahun 2014 sebesar 7,23% atau 96,40% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 7,23. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah sekolah 9 tahun.

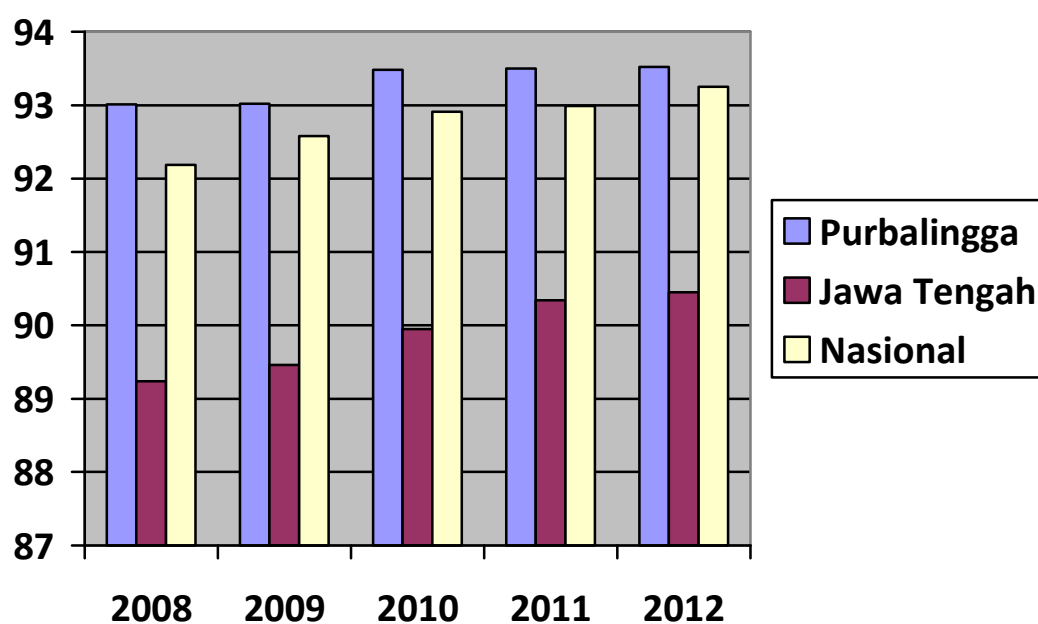
Tabel 3.37 Capaian Kinerja Meningkatnya rata-rata lama sekolah Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian %
Meningkatnya rata-rata lama sekolah	7,18 tahun	N/A	7.23 tahun	7,50 tahun	7.23 tahun	96,40

Realisasi indikator kinerja meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 adalah 7,18 tahun. Realisasi pada tahun 2012 tidak bisa diukur. Pada tahun 2013 sebesar 7,50 tahun dan tahun 2014 menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,23 tahun. Target akhir yang ditetapkan RPJMD paada akhir periodenya adalah 9 tahun.

Dengan berkembangnya perusahaan di Purbalingga berdampak pada usia sekolah yang bekerja pada perusahaan tersebut dan masih kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak. Mereka masih beranggapan dengan sekolah tinggi pun nantinya akan masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga. Faktor ekonomi dan gaya hidup berpengaruh sangat banyak. Dengan program BOS diharapkan anak usia sekolah akan melanjutkan minimal sampai ke jenjang SMP.

Gambar 3.5 Perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional



c. Meningkatnya angka partisipasi sekolah.

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Meningkatnya angka partisipasi sekolah Tahun 2014

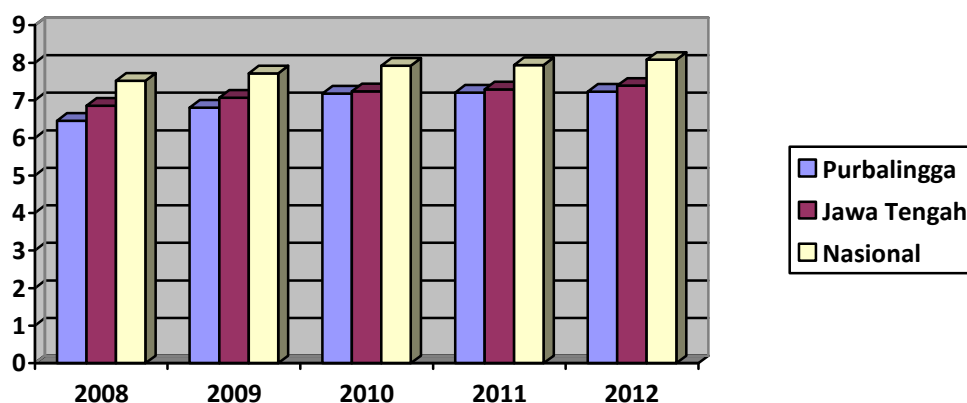
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya angka partisipasi sekolah						
• APM SD/ MI/ PAKET A	91,15%	91,99%	87,29%	95%	101%	106.31
• APM SMP/ MTs/ PAKET B	63,98%	50,50%	70,32%	76%	75,00%	93.76
• APM SMA/ SMK/ MA/ PAKET C	36,50%	32%	41,18%	43%	46,00%	102.95

Program Pendidikan Dasar : APK, APM tidak mencapai 100% karena menurunnya jumlah siswa usia sekolah yang kebanyakan dari mereka yang usia 15 tahun bekerja di perusahaan rambut sehingga lulusannya juga berkurang.

Program Pendidikan Menengah, indikator program yang tidak mencapai 100% karena kurangnya anggaran untuk membangun RKB (Ruang Kelas Baru)

Program Pendidikan Non Formal, indikator program yang tidak mencapai 100% karena kurangnya warga belajar yang mendaftar Kejar Paket A, Kejar Paket B, kejar Paket C dan banyak warga belajar yang tidak mengikuti ujian.

Gambar 3.6 Perbandingan angka partisipasi sekolah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional



Sasaran Keempat : Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

a. Meningkatnya indeks pembangunan gender.

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2014 sebesar 64,20 atau 98,20% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 64,02%.

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Meningkatnya indeks pembangunan gender Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	62,35	72,80	62,97	64,20	66,80	98,20

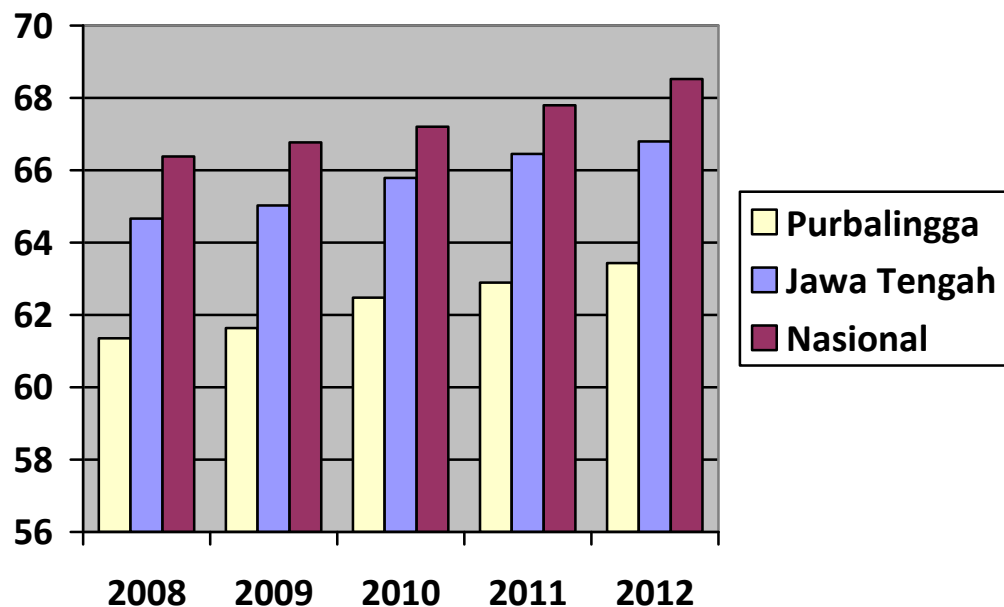
Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 adalah sebesar 62,35. Pada tahun 2012 realisasinya mengalami kenaikan menjadi 72,80. Tahun 2013 meningkat menjadi 72,97 dan pada tahun 2014 menjadi 73,49. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 74,18..

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan

memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 61,35 pada tahun 2008 menjadi sebesar 62,89 pada tahun 2012. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Purbalingga semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Gambar 3.7 Perbandingan indeks pembangunan gender Purbalingga, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik

b. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender.

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2014 sebesar 64,88 atau 94,02 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 62,89%.

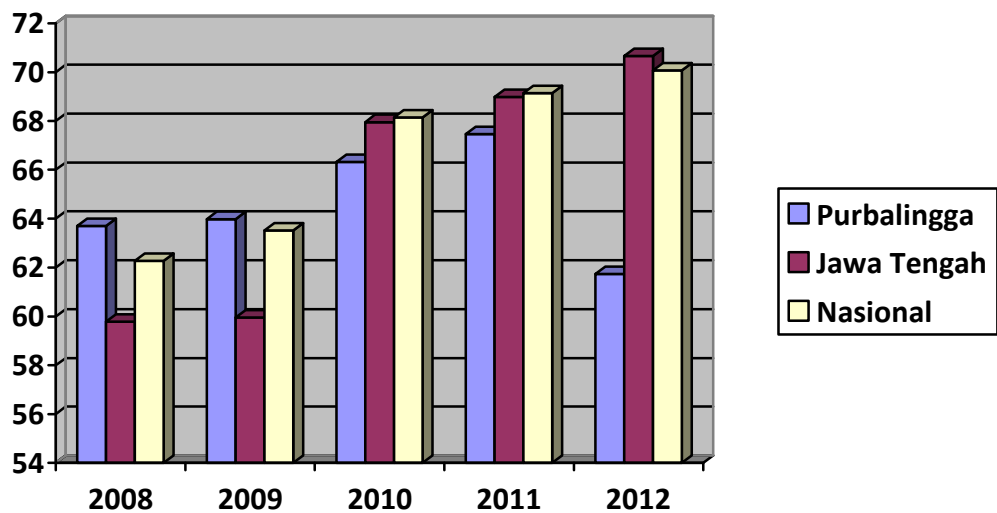
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Meningkatnya indeks pemberdayaan gender Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Indeks Pemberdayaan Gender	63,8	62,89	64,88	69	64,88	94,02

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 realisasinya adalah 63,80. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 menjadi 62,89. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 64,88. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,68 menjadi 64,20. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah 67.

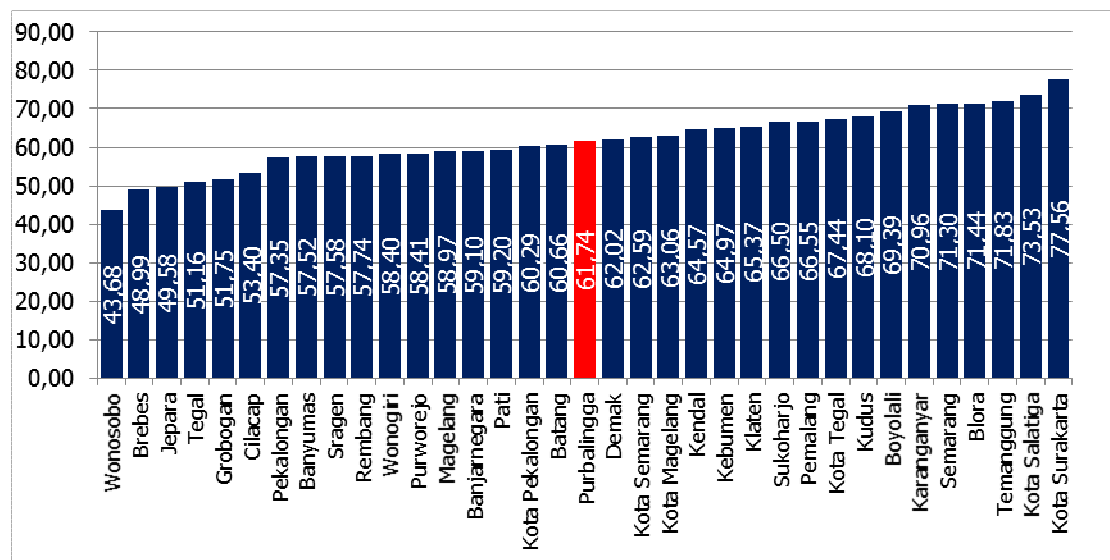
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan perkembangan yang positif, dari sebesar 63,70 pada tahun 2008 menjadi sebesar pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin baik.

Gambar 3.8 Perbandingan indeks Pemberdayaan gender Jawa Tengah dan Nasional



Capaian IDG Kabupaten Purbalingga menempati ranking ke-18 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.9 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BPS

c. Menurunnya presentase tenaga kerja di bawah umur.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2014 adalah 3 kasus atau 70% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2013.

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur	30 pekerja	4%	0	3	0	70

Realisasi Capaian Kinerja Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2011 realisasinya adalah 30 pekerja. Pada tahun 2012 adalah

4%. Pada tahun 2013 capaiannya adalah tidak ada dan tahun 2014 capaiannya 3 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah menurun 15%.

Menurunnya jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2013 menjadi 0% karena secara otomatis usia tenaga kerja pada tahun 2013 yang bersangkutan sudah otomatis menjadi usia tenaga kerja pada tahun 2013 dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat menjadi tenaga kerja dan sudah mempunyai kartu AK1 sebagai syarat mendaftar menjadi tenaga kerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

d. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2014 adalah 10 kasus atau 70% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 8 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun setiap tahunnya

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	11 kasus	11	8	7	10	70

Realisasi Capaian Kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 dan tahun 2012 realisasinya adalah 11 kasus. Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 8 kasus . tahun 2014 lebih tinggi dari pada tahun 2013 dan rebih rendah daripada tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 10 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada RPJMD adalah meburub.

Kendala yang dihadapi adalah masih kentalnya budaya patriaki dan tindak kekerasan ibarat fenomena gunung es sehingga kasus yang ada tidak begitu banyak tetapi dibawah permukaannya terdapat kasus yang sangat besar tetapi tidak dilaporkan. Upaya yang dilakukan melaksanakan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menangani kekerasan.

e. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2014 adalah 8 kasus atau 125% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 18 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.43 Capaian Kinerja Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	17 kasus	20	18	10	8	125

Realisasi indikator kinerja menurunnya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 sebanyak 17 kasus. Di tahun 2012, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 20 kasus. Pada tahun 2013 realisasinya adalah 18 kasus. Sedangkan tahun 2014 turun menjadi 8 kasus. Target yang ditentukan pada akhir RPJMD adalah menurun.

Kendala yang dihadapi adalah belum sepenuhnya anak mengetahui hak-hak mereka, kurangnya pendidikan orang tua dalam mendidik anak sehingga menyebabkan pengasuhan yang salah, kemiskinan keluarga memaksa anak untuk bekerja dan kesibukan orang tua sehingga menjadi kurangnya kasih sayang kepada anak. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terbentuknya forum anak sebagai implementasi terwujudnya kabupaten layak anak.

Sasaran Kelima : Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga.

a. Meningkatnya presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani tahun terdata di Kabupaten

Purbalingga adalah sebanyak 224.926 orang. Realisasi tahun 2014 adalah 1.094 orang atau 60% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 3%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 7%. Itu berarti belum memenuhi target. Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2014 sebanyak 65.470 orang sedangkan yang baru tertangani sebanyak 1.470 orang. Itu dikarenakan karena terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Dinsosnakertrans

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	2011	2012	2013	2014	2014	%
Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	2,6%	0,82%	2,24%	3%	1.094 (1,67)	60

Realisasi indikator kinerja meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani pada tahun 2011 sebesar 2,6%. Realisasi pada tahun 2012 mengalami penurunan secara drastis dibandingkan tahun 2011 sebesar 0,82%. Realisasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 2,24%. Sedangkan tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 1.094 orang. Target yang ditetapkan RPJMD adalah 7%.

b. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah rumah tangga miskin tahun 2014 sebesar 20,58% atau 90,92% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 21,19. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tidak ada rumah tangga miskin di Purbalingga.

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Menurunnya jumlah rumah tangga miskin Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya jumlah rumah tangga miskin	23,73%	22,58%	21,19%	20,58%	20,58% (2013)	90,92

Realisasi indikator Kinerja Menurunnya jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2011 sebesar 23,73%. Pada tahun 2012 ada peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 22,58%. Akan tetapi pada tahun 2013 kembali turun dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 yaitu 21,19%. Pada tahun 2014 realisasinya adalah 20,58%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun 9%.

Penduduk dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yaitu batas minimum makanan (setara 2100 kalori) ditambah dengan biaya pengeluaran untuk kebutuhan non makanan yang esensial seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan beberapa barang lainnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar 20,53 dari seluruh penduduk Purbalingga dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 265.262 perkapita/bulan, atau sejumlah 181.100 jiwa, menurun dari tahun 2012 sebesar 21,19 persen atau 181,3 ribu jiwa. Salah satu faktor penyebab bertolak belakangnya presentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin dikarenakan naiknya garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga, dimana pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 247.508 perkapita/bulan, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 265.262 perkapita/bulan.

Tabel 3.46
Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	205.000	208.698	195.999	181.400	181.100

2	Persentase Penduduk Miskin (persen)	24,97	24,57	23,06	21,19	20,53
---	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 17,48% dan Nasional sebesar 14,15%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-4 tertinggi di Jawa Tengah.

Sasaran Keenam : Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.

a. Menurunnya angka kasus kenakalan remaja.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kasus kenakalan remaja tahun 2014 sebesar 6 kasus atau 200% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih bagus dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 14 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun setiap tahunnya.

Kondisi geografis Kabupaten Purbalingga yang sebagian merupakan dataran tinggi apabila dalam melakukan patroli/razia anak sekolah ke wilayah terkendala cuaca (kabut) serta tidak didukung dinas/instansi yang membidangi pendidikan.

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Menurunnya angka kasus kenakalan remaja Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka kasus kenakalan remaja	2 kasus	64	6 kasus	14 kasus	6 kasus	200

Realisasi indikator kinerja menurunnya angka kasus kenakalan remaja pada tahun 2011 sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2012 kasus yang terjadi meningkat secara drastis yaitu sebanyak 64 kasus. Pada tahun 2013 kasus yang terjadi menurun menjadi 6 kasus. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun.

b. Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras tahun 2014 sebesar 19 kasus atau 250% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih bagus dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 71 kasus. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.48 Capaian Kinerja Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	capaian %
Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras	8 kasus	71 Kasus	19 kasus	50 Kasus	19 kasus	250

Realisasi indikator kinerja menurunnya kasus penggunaan narkoba dan miras pada tahun 2011 adalah sebesar 8 kasus. Pada tahun 2012 kasus yang terjadi meningkat secara drastis yaitu sebanyak 71 kasus. Pada tahun 2013 kasus yang terjadi menurun menjadi 19 kasus. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2014. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun

Adanya arus informasi yang semakin canggih, sehingga menyebabkan perubahan pola pikir remaja saat ini, yang cenderung melakukan pergaulan yang semakin bebas yang berpotensi meningkatkan penggunaan narkoba pada generasi muda.

Di Purbalingga sudah ada Panti Rehabilitasi Korban Narkoba. Terlebih lagi, setiap tahunnya ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah korban pengguna narkoba yang dirawat di Panti Rehabilitasi YPI “Nurul Ichsan Al-Islami”. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring dan pendampingan

korban pecandu narkoba yaitu, kadang dari pihak rumah sakit kurang terbuka dengan keberadaan pasien yang ditangani. Hal ini dimungkinkan karena situasi dan kondisi pasien dianggap merupakan aib bagi keluarga dan keluarga pasien tidak ingin identitas diketahui oleh umum. Solusi kedepan kami akan lebih memberikan pemahaman kepada pihak keluarga tentang kegiatan ini.

c. Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif tahun 2014 adalah 140 organisasi atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2014 yaitu sebesar 136 organisasi. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 239 organisasi.

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif	174 organisasi	130 Organisasi	136 organisasi	140 Organisasi	140 organisasi	100

Realisasi indikator Kinerja Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif pada tahun 2011 sebanyak 174 organisasi. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 130 organisasi. Untuk tahun 2013 realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 136 organisasi. Sedangkan pada tahun 2014 menjadi 140 organisasi. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 239 organisasi.

Peningkatan jumlah karang taruna yang aktif pada tahun 2014 meningkat menjadi 140 organisasi. Pembinaan secara berkala yang dilakukan akan lebih menambah daya tarik tersendiri dalam mendorong masyarakat untuk membentuk suatu organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Ada beberapa keuntungan dengan adanya jumlah kelompok masyarakat antara lain

memudahkan mendapatkan informasi untuk kemajuan baik itu untuk kelompok maupun untuk dirinya sendiri.

d. Meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan tahun 2014 adalah 27.534 atau 45,89% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 40.078 orang.

Tabel 3.50 Capaian Kinerja Meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan	56.314 orang	52.750 orang	40.078 orang	60.000 orang	27.534 orang	45,89

Realisasi indikator kinerja meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2011 sebesar 56.314 orang. Pada tahun 2012 terjadi penurunan angka kunjungan perpustakaan menjadi 52.750 orang. Realisasi pada tahun 2013 turun menjadi 40.078 orang. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2014 menjadi 27.534 orang. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Pada tahun 2014 pengunjung perpustakaan ditargetkan sebesar 60.000 orang. Namun hanya tercapai 27.534 orang. Hal ini terjadi karena pada awal tahun 2014 perpustakaan daerah menempati gedung baru dan tidak bergabung lagi dengan museum Soegarda Purbakawatja. Sekarang pengunjung perpustakaan adalah pengunjung murni dari perpustakaan dan Perpustakaan Daerah telah menerapkan sytem otomatis perpustakaan, sehingga pengunjung perpustakaan sudah dapat dilihat pengunjung riilnya secara otomatis. Perpustakaan Daerah berupaya untuk meningkatkan angka kunjungan terutama bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan cara sosialisasi di sekolah-sekolah dan perpustakaan keliling ke desa-desa.

e. Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat tahun 2014 adalah 2 kasus atau 50% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih rendah dari pada capaian tahun 2012 adalah tidak ada kasus.

Tabel 3.51 Capaian Kinerja Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat	0	0	0	0	2	50

Sasaran Ketujuh : Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga

a. Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional tahun 2014 adalah 275 atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 263. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 239 organisasi.

Dinbudparpora secara periodik mendata dan membina kelompok seni yang ada di Purbalingga baik yang sudah berjalan dan menginventarisasi kelompok seni yang baru.

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional	210	98,93%	263	275	275	100

b. Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional tahun 2014 adalah 25 kali atau 102% dari target yang ditentukan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.53 Capaian Kinerja Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional	25 kali	87,66%	15 kali	23 kali	25 kali	102

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 25 kali. Pada tahun 2012 peningkatan adalah 87,66%. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun dari tahun 2011 menjadi 15 kali. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 23 kali. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Meningkatnya jumlah kegiatan pentas seni tradisional dikarenakan oleh adanya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan dan juga permintaan dari pihak lain untuk bantuan pentas seni.

Sasaran Kedelapan : Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan.

a. Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional.

Realisasi capaian indikator kinerja Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional tahun 2014 adalah 10 kegiatan atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 10 kegiatan.

Tabel 3.54 Capaian Kinerja Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	100%	17 kegiatan	10 kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 100%. Pada tahun 2012 menjadi 17 kegiatan. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi 10 kegiatan. Dan pada tahun 2014 adalah 10 kegiatan. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 100%.

Berlatar belakang sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa lain, Indonesia telah mengalami berbagai fase kedaulatan dalam jangka waktu yang panjang. Setiap fase tersebut dilalui dengan cucuran darah dan keringat semangat untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Setiap fase itu pula menjadi tonggak sebuah peristiwa bersejarah yang harus diperingati. Sebagai upaya untuk mengingat kembali semangat dan penghargaan jasa para pahlawan, tonggak – tonggak peristiwa tersebut kemudian dideklarasikan sebagai hari besar nasional. Tiada lain bahwa peringatan hari besar nasional sebagai upaya memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa agar senantiasa terus dijadikan sebagai tali pengikat tali pengikat keutuhan bangsa.

b. Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama tahun 2014 adalah 12 kegiatan yang terdiri dari 4 kali etnis dan 8 kali kegiatan agama atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 12 kegiatan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 18 kegiatan.

Tabel 3.55 Capaian Kinerja Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama	18 kali	10 kali	Etnis 4 kali Agama 8 kali	Etnis 4 kali Agama 8 kali	Etnis 4 kali Agama 8 kali	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 18 kali. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 10 kali. Akan tetapi pada tahun 2013 ada peningkatan menjadi 12 kali. Sedangkan pada tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2014. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 18 kali.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebhinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Kebinekaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. dalam rangka menyelenggarakan otonomi. daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Keempat : **Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah**

Sasaran Kesatu : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga

a. Stabilitasnya angka inflasi.

Laju inflasi di Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 9,08%. Angka inflasi ini menurun dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 9,57%.

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Stabilitasnya angka inflasi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Stabilitasnya angka inflasi	4,47%	4,09%	9,57	5-6%	9,08%	99,78

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 4,47%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 4,09%. Akan tetapi pada tahun 2013 meningkat drastis menjadi 9,57%. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 9,08%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah dibawah 7%.

Kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 apabila ditinjau dari perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara umum, terlihat lebih stabil apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Kondisi ini dapat dilihat dari pergerakan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan yang cenderung stabil, sehingga inflasi tahunan yang dicapai lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Laju inflasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2014 mencapai sebesar 9,08 persen, lebih rendah dari laju inflasi tahun 2013 sebesar 9,57 persen (YoY). Angka inflasi tahun 2013 merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Inflasi Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 8,36% maupun angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,22 persen. Salah satu penyebab tingginya laju inflasi yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan November 2014 yang mendorong naiknya harga beberapa komoditas terutama kelompok transportasi dan bahan

makanan. Perkembangan inflasi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.57
Inflasi (*Year on Year*) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2008 – 2013

No	Tahun	Persen (%)
1	2009	3,35
2	2010	7,82
3	2011	4,47
4	2012	4,09
5	2013	9,57
6	2014	9,08

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

b. Meningkatnya daya beli masyarakat.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya daya beli masyarakat tahun 2014 sebesar Rp. 641.630,- atau 100,41% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 638.410,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.58 Capaian Kinerja Meningkatnya daya beli masyarakat Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya daya beli masyarakat	Rp. 631.040,-	Rp. 636.000,-	Rp. 638.410,-	Rp. 640.000,-	Rp. 641.630,- (2013)	100,41

Pada tahun 2011 realisasinya adalah Rp. 631.040,-. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi Rp. 636.000,-. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 638.410,-. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 641.630,-. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah Rp. 690.000,-.

Tolak ukur kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari pola pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 masih terdapat 0,29 persen rumah tangga yang pengeluarannya antara Rp. 80.000,- sampai Rp. 99.999,- , pada tahun 2011 tinggal 0,08 persen. Pada tahun 2012, pengeluaran rumah tangga rata-rata sudah diatas Rp. 100.000,-. Persentase rumah tangga yang pengeluarannya diatas Rp. 300.000,- mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebanyak 60,22 persen meningkat menjadi 62,08 persen di tahun 2012. Sementara itu pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 641.650,-.

c. Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar tahun 2014 sebesar 152 sampel atau 95% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 150 sampel. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.59 Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar	115 sampel	225 sampel	150 sampel	160 sampel	152 sampel	95

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 115 sampel. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 225 sampel. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi 150 sampel. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 152 sampel. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Tingkat kewanamanan pangan dan kualitas gizi diukur dengan uji laboratorium pada makanan yang beredar dari target 160 terpenuhi 152 sampel makanan sehingga tercapai 95%, dari 152 sampel makanan yang diperiksa ada 7 jenis makanan yang ditemukan tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini telah

dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada penyedia dan penjaja makanan. Dengan demikian maka makanan yang beredar dipasaran diharapkan memenuhi syarat kesehatan.

d. Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun).

Realisasi capaian indikator kinerja Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) tahun 2014 adalah 114.454 kg/kapita/tahun atau 155,42% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu 169.420 kg/kapita/tahun.

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun)	144,748 kg/ kapita/ tahun	157.146 kg/ kapita/ tahun	169.420 kg/ kapita/ tahun	177.891 kg/ kapita/ tahun	114.454 kg/ kapita/ tahun	155,42

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 144,748 kg/ kapita/ tahun. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 157,146 kg/ kapita/ tahun. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 169,420 kg/ kapita/ tahun. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 114,454 kg/ kapita/ tahun. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah diatas angka normatif.

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan produksi pangan berupa beras dibandingkan dengan jumlah penduduk tengah tahun. Konsumsi pangan normative beras adalah 92,87 kg/kapita/ tahun. Ketersediaan pangan harus melebihi angka konsumsi tersebut. Produksi beras tahun 2014 adalah 223.225 ton, sedangkan jumlah penduduk tengah tahun Kabupaten Purbalingga adalah 927.978 jiwa. Kendala yang dihadapi adalah :

1. Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan, industri, fasilitas umum dll).

2. Jaringan irigasi teknis banyak mengalami kerusakan sehingga irigasi mengalami kebocoran.
3. Terjadinya serangan hama tanaman.

Upaya yang dilakukan

1. Menetapkan lahan pangan lestari/ abadi yang tidak boleh dialih fungsika pada kawasan budidaya, sedangkan pada kawasan non budidaya adalah memperketat perijinan alih fungsi lahan.
2. Perbaiki jaringan irigasi teknis saluran sekunder, tersier dan non teknis.
3. Pemberantasan hama secara terpadu.

e. Meningkatnya indeks konsumsi non pangan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya indeks konsumsi non pangan tahun 2014 adalah 45,45% atau 93,22% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut turun dari capaian tahun 2013 yaitu 44,9%.

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tahun) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya indeks konsumsi non pangan	Meningkat 1,04%	82,7%	44,9%	45,45%	42,37%	93,22

Pada tahun 2011 realisasinya adalah meningkat 1,04%. Pada tahun 2012 menjadi tahun 2011 menjadi 82,7%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 menjadi 44,9%. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 42,37%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Peningkatan konsumsi non pangan bertujuan agar konsumsi pangan masyarakat jangan bersumber dari karbohidrat saja, tetapi juga bersumber dari sumber gizi lainnya. Kendala yang dihadapi antara lain konsumsi pangan masyarakat belum beragam dan seimbang, sebagian besar berkonsumsi masih bersumber dari karbohidrat terutama beras serta perubahan budaya pola konsumsi pangan memerlukan waktu yang lama dan berkelanjutan. Untuk mengupayakan hal tersebut dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan program

percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan mengenalkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman.

Kabupaten Purbalingga telah mencanangkan *“Gerakan One Day No Rice”* yang dilaksanakan setiap hari Rabu dengan mengkonsumsi makanan pengganti nasi/ karbohidrat yang bersumber dari bahan lokal seperti nasi jagung, tiwul, umbi-umbian dll serta snack yang berbahan baku non beras dan non terigu dalam setiap rapat maupun pertemuan baik formal maupun non formal agar kudapan dan buah-buahan yang disajikan dapat memanfaatkan pangan dan buah lokal.

Gerakan *“Gerakan One Day No Rice”* sebagai upaya Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan mengurangi terigu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal yang diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat diiringi dengan peningkatkan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan konsumsi impor dan meningkatkan surplus beras di Purbalingga serta mewujudkan kestabilan harga bahan baku kebutuhan pokok.

Sasaran Kedua : Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

a. Meningkatnya pendapatan per kapita.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya pendapatan per kapita tahun 2014 sebesar Rp. 8.803.077,71,- atau 96,71% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 5.803.077,71,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.62 Capaian Kinerja Meningkatnya pendapatan per kapita Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya pendapatan per kapita	6,7 juta/ th	Rp. 5,8 Juta/ th	Rp. 5.800.0 00/ th	Rp. 8 Juta/ th	Rp. 8.803.077, 71	110

Pada tahun 2011 realisasinya adalah Rp. 6,7 juta/tahun. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi Rp. 5.800.000 per tahun. Pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012 menjadi Rp. 5.800.000 per tahun. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 8.803.077,71 per tahun. Pada tahun 2014 sudah mencapai target akhir RPJMD. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah Rp. 8.400.000 per tahun.

Ukuran keberhasilan pembangunan perekonomian yang sering digunakan dari PDRB adalah PDRB perkapita dan Income percapita. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antar nilai tambah bruto dengan penduduk pertengahan tahun yang bersesuaian. Ukuran ini menunjukkan secara rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap individu penduduk, dari yang masih bayi hingga yang berusia lanjut. Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 secara rata-rata menghasilkan PDRB perkapita sebesar 9.270.528,- rupiah, dari penduduk sebanyak 879.880 jiwa. Dengan kata lain, nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Purbalingga baru mencapai sekitar Rp. 772.543,97,- per bulan.

b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini).

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini) tahun 2014 sebesar 0,33 atau 78,78% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dengan capaian tahun 2013 yaitu 0,27. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,22 (rendah).

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini)	0,25	0,27	0,27	0,26	0,33 **	78,78

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 0,25. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 0,27. Pada tahun 2013 realisasinya sama dengan tahun 2012 menjadi 0,27. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,33. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 0,22.

Untuk koefisien Gini atau Gini Rasio adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan agregat yang dapat bervariasi antara nol sampai satu. Koefisien gini sama dengan nol menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya, sedangkan koefisien gini sama dengan satu menunjukkan adanya ketidakmerataan atau ketimpangan sepenuhnya.

Indeks Gini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menghitung ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya mencakup antara 0 hingga 1. Ketimpangan yang diukur menggunakan Indeks Gini biasanya bervariasi, tergantung kepada kebutuhan. Salah satu indikator yang dapat dihitung menggunakan indeks gini adalah ketimpangan terhadap pendapatan. Capaian Indeks Gini yang menunjukkan angka 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan pendapatan diantara satu penduduk dengan penduduk yang lain, sedangkan apabila menunjukkan angka 1 maka dipastikan terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi antara penduduk satu dengan yang lainnya. Ketimpangan yang terjadi berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Gini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila capaian Indeks Gini berada dibawah 0,3; sedang apabila capaian Indeks Gini antara 0,3-0,4; dan tinggi apabila capaian Indeks Gini mencapai lebih dari 0,4.

Berdasarkan definisi diatas, capaian ketimpangan pendapatan diantara masyarakat Kabupaten Purbalingga antara tahun 2009-2011 relatif sedang. Ketimpangan berada dalam kategori sedang pada tahun 2012 ketika capaian Indeks Gini mencapai 0,33. Capaian indeks Gini Kabupaten Purbalingga secara umum masih lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah.

c. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson).

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson) tahun 2014 sebesar 0,49 atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 0.49. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,3 (rendah).

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson)	0,46	0,45	0,49	0,49	0,49	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 0,46. Pada tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 2011 menjadi 0,45. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 0,49. Sedangkan pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu 0,49. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 0,3.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah diukur dengan Indeks Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson atau mendekati nilai 1 (satu) maka semakin tinggi ketimpangan antar wilayah. Di Kabupaten Purbalingga, (Indeks Williamson) dari tahun 2007 sampai tahun 2013 masih dibawah 0,50 yang artinya masuk kategori kesenjangan sedang.

Tabel 3.65 Indeks Ketimpangan Regional

Tahun	Indeks Williamson	
	Purbalingga	Jawa Tengah
2007	0,5034	N/A
2008	0,49	0,7092
2009	0,4702	0,7035
2010	0,464	0,6972
2011	0,4995	0,6965
2012	0.48525*	N/A
2013	0.4873**	N/A

Sumber : BPS, Data Diolah

d. Menurunnya angka pengangguran.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2014 adalah 3.906 orang atau 86,80% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 3.123 orang dari seluruh penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya investor yang masuk ke Purbalingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia bekerja di Purbalingga. Pada tahun 2014 jumlah perusahaan di Purbalingga bertambah sebanyak 1 perusahaan. Itu berimbas pada pembukaan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Di daerah-daerah pedesaan saat ini banyak terdapat *plasma* atau anak cabang perusahaan. Banyak angkatan kerja yang tertampung di perusahaan tersebut.

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Menurunnya angka pengangguran Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka pengangguran	4,54%	30,50%	3.123 orang	4.500 orang	3.906 orang	86,80

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 4,54%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 30,50%. Pada tahun 2013 menjadi 3.123 orang. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.906 orang. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 4,5%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu empat tahun (2008-2013) cenderung penurunan dari sebesar 7,08% pada tahun 2008 menjadi sebesar 5,72% pada tahun 2013. TPT di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah sebesar 6,02% dan capaian nasional sebesar 6,14%.

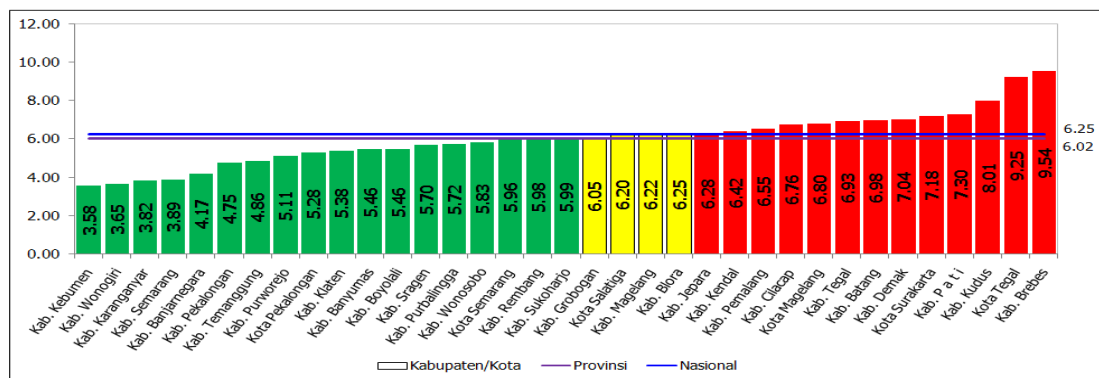
Tabel 3.67
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2008	7,08
2009	4,66
2010	3,82
2011	5,54
2012	5,14
2013	5,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2013

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, TPT di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-14 dari yang terendah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.10 Grafik Peringkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa tengah



e. Menurunnya angka kemiskinan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya angka kemiskinan Tahun 2014 adalah 20,58% atau 68,03% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 20,19% dari seluruh penduduk.

Tabel 3.68 Capaian Kinerja Menurunnya angka kemiskinan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	TARGET 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka kemiskinan	24,57%	23%	20,19%	14%	20,58%	68,03

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 24,57%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 23%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 20,19%. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 20,58%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah 19%.

Penduduk dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yaitu batas minimum makanan (setara 2100 kalori) ditambah dengan biaya pengeluaran untuk kebutuhan non makanan yang esensial seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan beberapa barang lainnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar 20,53 dari seluruh penduduk Purbalingga dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 265.262 perkapita/bulan, atau sejumlah 181.100 jiwa, menurun dari tahun 2012 sebesar 21,19 persen atau 181,3 ribu jiwa. Salah satu faktor penyebab bertolak belakangnya presentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin dikarenakan naiknya garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga, dimana pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 247.508 perkapita/bulan, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 265.262 perkapita/bulan.

Tabel 3.69
Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	205.000	208.698	195.999	181.400	181.100
2	Persentase Penduduk Miskin (persen)	24,97	24,57	23,06	21,19	20,53

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 17,48% dan Nasional sebesar 14,15%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-4 tertinggi di Jawa Tengah.

Sasaran Ketiga : Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi

a. Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani tahun 2014 sebesar 105,55 atau 95,95 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 99,04. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.70 Capaian Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani	107,8	102	99,04	110	105,55	95,95

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 107,8. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 102. Pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 99,04. Akan tetapi pada tahun 2014 naik menjadi 105,55. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam melakukan kegiatan produksi pertanian. Melalui pengukuran NTP akan diketahui tingkat kesejahteraan petani. Pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam melakukan kegiatan produksi pertanian. Melalui pengukuran NTP akan diketahui tingkat kesejahteraan petani.

Tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Purbalingga yang di ukur berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 indeks NTP mengalami fluktuasi. Pada triwulan I terjadi tren penurunan Indeks NTP, yaitu pada bulan Januari sebesar 105,57 naik menjadi sebesar 108,21 (Februari) dan 105,52 (Maret).

Penurunan ini disebabkan rendahnya indeks harga yang diterima petani (It) apabila dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pada Triwulan II juga mengalami penurunan dibulan April (99,93) kemudian mengalami penurunan di bulan Mei menjadi sebesar (98,69), namun ditutup dengan

penurunan indeks NTP dibulan Juni (101,28). Triwulan III dan IV mengalami tren fluktuatif. Tahun 2014 ditutup dengan kenaikan NTP sebesar 1,731 dari bulan Nopember (103,82) menjadi 105,55 di bulan Desember.

b. Meningkatnya investasi di sektor agribisnis.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya investasi di sektor agribisnis tahun 2014 belum dapat terukur. Capaian tahun 2013 juga belum bisa terukur. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.71 Capaian indikator Meningkatnya investasi di sektor agribisnis Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya investasi di sektor agribisnis	N/A	5%	N/A	8%	N/A	65,21

Pada tahun 2011 belum bisa mengukur hasilnya. Pada tahun 2012 realisasinya adalah 5%. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 belum bisa mengukur hasilnya. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat 20%.

c. Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya Penggunaan Pupuk dan Obat Kimia di sektor Pertanian tahun 2014 adalah 10,13% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 7%.

Tabel 3.72 Capaian indikator Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian	0,5% (20.900 ton)	25%	7%	10%	10,13%	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 0,5%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sangat besar dibandingkan tahun 2011 menjadi 25%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 menjadi 7%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 10,13%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah menurun 20%.

Purbalingga mempunyai lahan pertanian sebesar 217.391 ha. Para petani sampai saat ini masih percaya terhadap pupuk kimia yang langsung bisa dilihat hasilnya dibandingkan dengan pupuk organik. Disamping itu pula harga pupuk organik yang belum mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harganya belum terjangkau oleh petani dan akan meningkatkan biaya produksi. Dengan mendasarkan pada ketersediaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan Unit Pembuatan Pupuk Organik (UPPO) di kabupaten Purbalingga sebanyak 348 Unit serta Program/ Kegiatan Pertanian Organik dari Program Peningkatan Produksi, Produktifitas Mutu Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

Permasalahn yang dihadapi adalah kurangnya ketrampilan petani dalam penggunaan pupuk organik, kurangnya ketersediaan pupuk organik dalam jumlah yang cukup dan kualitas pupuk organik yang perlu ditingkatkan. Sedangka upaya yang dilakukan antara lain pelatihan petani dalam pembuatan pupuk organik dan bantuan analisa kandungan unsur hara dalam pupuk organik.

d. Meningkatnya angka kunjungan wisata.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya angka kunjungan wisata tahun 2014 adalah 1.319.088 atau 82,44% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 1.458.513. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.73 Capaian Indikator Meningkatnya angka kunjungan wisata Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya angka kunjungan wisata	1.507.707	1.021.253	1.458.513	1.600.000	1.319.088	82,44

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 1.507.707. Pada tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 2011 menjadi 1.021.253. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 1.458.513. Sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 1.319.088. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat 20%.

Faktor cuaca sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga. Itu dikarenakan oleh ada beberapa obyek wisata yang terletak di daerah pegunungan yang tingkat hujannya tinggi. Dan juga sekarang sudah ada beberapa daerah yang membangun objek wisata yang sama dengan Purbalingga. Sehingga para wisatawan memilih obyek wisata yang lebih dekat dengan daerah mereka masing-masing.

- e. Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran).

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) tahun 2014 sebesar 11% atau 68,75 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 11%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat 40% tiap tahunnya.

Tabel 3.74 Capaian indikator Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran)	15,63%	15,2%	11%	16%	11%	68,75

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 15,63%. Pada tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 2011 menjadi 15,2%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 11%. Sedangkan pada tahun 2014 realisasinya sama dengan tahun 2014 yaitu 11%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat 40%.

Adapun peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap perolehan PDRB total pada tahun 2013 atas dasar harga konstan adalah sebagai berikut. Sektor Pertanian (30,53 persen), Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan (19,70 persen), Jasa-jasa (18,48 persen) dan Industri Pengolahan (10,27 persen), sedangkan lima sektor lainnya memberikan sumbangan kurang dari 10 persen. Dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh sektor mengalami percepatan diatas laju pertumbuhan rata-rata umum (5,58 persen), kecuali sektor pertanian dan sektor jasa-jasa masing-masing hanya melaju dengan kecepatan 2,51 persen, dan 4,71 persen. Perkembangan distribusi PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.75 Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) Tahun 2014

Sektor	2010		2011		2012		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian	1.803.744,3 29	31,2 6	1.992.355, 56	30,55	2.180.824,89	29,8 8	2.384.198,6 6	29,2 3
Pertambangan dan Penggalian	40.390,948	0,70	45.651,35	0,70	51.090,28	0,70	58.303,35	0,71
Industri Pengolahan	614.519,42 1	10,6 5	722.595,73	11,08	815.254,82	11,1 7	886.811,27	10,8 7
Listrik, Gas dan Air Bersih	51.354,205	0,89	55.433,79	0,85	60.578,47	0,83	70.464,09	0,86
Konstruksi dan Bangunan	463.341,87 3	8,03	517.816,80	7,94	572.211,08	7,84	640.776,29	7,86
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.063.435,9 56	18,4 3	1.207.804, 42	18,52	1.387.465,90	19,0 1	1.588.281,8 0	19,4 7
Pengangkutan dan Komunikasi	308.702,24 4	5,35	334.559,21	5,13	380.257,62	5,21	431.702,84	5,29
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	378.520,88 3	6,56	422.601,11	6,48	477.329,14	6,54	599.780,82	6,86
Jasa-jasa	1.046.125,5 50	18,1 3	1.222.804, 15	18,75	1.373.598,54	18,8 2	1.536.632,8 0	18,8 4

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

f. Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB tahun 2014 sebesar 0,2% atau 45% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 0,1%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat 10% tiap tahunnya.

Tabel 3.76 Capaian indikator Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Existing 2012	Capaian 2013	TARGET 2014	Capaian 2014	Capaian %
Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB	Meningkat 1,5%	0,1%	0,09%	0,2%	0,09%	45

Pada tahun 2011 realisasinya adalah meningkat 1,5%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 menjadi 0,1%. Pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 0,09%. Sedangkan pada tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013 yaitu 0,09%. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah diatas angka normatif.

Adapun peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap perolehan PDRB total pada tahun 2013 atas dasar harga konstan adalah sebagai berikut. Sektor Pertanian (30,53 persen), Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan (19,70 persen), Jasa-jasa (18,48 persen) dan Industri Pengolahan (10,27 persen), sedangkan lima sektor lainnya memberikan sumbangan kurang dari 10 persen. Dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh sektor mengalami percepatan diatas laju pertumbuhan rata-rata umum (5,58 persen), kecuali sektor pertanian dan sektor jasa-jasa masing-masing hanya melaju dengan kecepatan 2,51 persen, dan 4,71 persen. Perkembangan distribusi PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.77 Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB hotel dan restoran) Tahun 2014

Sektor	2010		2011		2012		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian	1.803.744,3 29	31,2 6	1.992.355, 56	30,55	2.180.824,89	29,8 8	2.384.198,6 6	29,2 3
Pertambangan dan Penggalian	40.390,948	0,70	45.651,35	0,70	51.090,28	0,70	58.303,35	0,71
Industri Pengolahan	614.519,42 1	10,6 5	722.595,73	11,08	815.254,82	11,1 7	886.811,27	10,8 7
Listrik, Gas dan Air Bersih	51.354,205	0,89	55.433,79	0,85	60.578,47	0,83	70.464,09	0,86
Konstruksi dan Bangunan	463.341,87 3	8,03	517.816,80	7,94	572.211,08	7,84	640.776,29	7,86
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.063.435,9 56	18,4 3	1.207.804, 42	18,52	1.387.465,90	19,0 1	1.588.281,8 0	19,4 7
Pengangkutan dan Komunikasi	308.702,24 4	5,35	334.559,21	5,13	380.257,62	5,21	431.702,84	5,29
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	378.520,88 3	6,56	422.601,11	6,48	477.329,14	6,54	599.780,82	6,86
Jasa-jasa	1.046.125,5 50	18,1 3	1.222.804, 15	18,75	1.373.598,54	18,8 2	1.536.632,8 0	18,8 4

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

g. Meningkatnya jumlah industri kecil

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah industri kecil adalah 42.147 industri atau 105,36% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu 41.930 industri. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.78 Capaian Indikator Meningkatkan jumlah industri kecil Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah industri kecil	38.080 industri	39.240 industri	41.930 industri	40.000 industri	42.147 industri	105,36

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 38.080 industri. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 menjadi 39.240 industri. Pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 41.930 industri. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 42.147 industri. Target akhir yang ditetapkan pada akhir RPJMD adalah meningkat.

Semakin mudahnya proses investasi di Purbalingga maka banyak investor yang masuk. Hal ini akan meningkatkan nilai ekonomi pada masyarakat. Meningkatnya industri kecil yang ada di Purbalingga akan membuka banyak lowongan pekerjaan yang bagi masyarakat khususnya yang berpendidikan rendah. Kegiatan yang dilakukan adalah promosi potensi daerah di berbagai even untuk menarik para investor-investor baru. Dengan demikian itu langkah awal untuk menjadikan Purbalingga menjadi kota industri. Untuk sekaraang ini potensi daerah yang sedang digalakkan oleh Bapak Bupati Purbalingga adalah Batu Akik. Hal ini menyebabkan tumbuhnya industri kecil dan membuka lowongan pekerjaan.

Sasaran Keempat : Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan

a. Meningkatnya jumlah PMA.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah PMA tahun 2014 meningkat 1 perusahaan (21 perusahaan) atau 80,77% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih besar dari capaian tahun 2013 yaitu tambah 20 perusahaan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 bertambah setiap tahunnya.

Tabel 3.79 Capaian Meningkatkan jumlah PMA Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Existing 2012	Capaian 2013	TARGET 2014	Capaian 2014	Capaian %
Meningkatnya jumlah PMA	21 perusahaan	2 Perusahaan	20 Perusahaan	26 Perusahaan	21 Perusahaan	80,77

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 21 perusahaan. Realisasi tahun 2012 meningkat 2 perusahaan menjadi 23 perusahaan. Pada tahun 2013 ada beberapa perusahaan yang dibeli oleh investor dalam negeri dan ada beberapa pula yang tutup sehingga menjadi 20 perusahaan. Pada tahun 2014 meningkat 1 perusahaan menjadi 21 perusahaan.

Iklim investasi di Purbalingga yang semakin kondusif, maka banyak investor yang menanamkan modalnya di Purbalingga. Untuk menarik para investor pemerintah mengupayakan dengan melakukan promosi dan pemasaran potensi daerah, temu bisnis. Tetapi kendala yang dihadapi adalah semakin terbatasnya lahan untuk kawasan industri yang sesuai dengan Perda Tata Ruang dan ketersediaannya dokumen tentang potensi dan peluang investasi di Purbalingga

b. Meningkatkan nilai investasi PMA.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatkan nilai investasi PMA tahun 2014 adalah Rp. 3.512.100.000,- atau 84,51% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun capaian tahun 2012 yaitu Rp. 35.800.000.000,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 bertambah setiap tahunnya.

Tabel 3.80 Capaian indikator Meningkatkan nilai investasi PMA Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	TARGET 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya nilai investasi PMA	Rp. 154.514. 511.500	Rp. 35.800. 000.000	Rp. 29,581. 601.000	Rp. 29,581. 601.000	Rp. 3.512.1 00.000	84,51

Pada tahun 2011 realisasinya adalah Rp. 154.514.511.500,-. Realisasi tahun 2012 menurun menjadi Rp. 35.800.000.000,-. Pada tahun 2013 ada

beberapa perusahaan yang dibeli oleh investor dalam negeri dan ada beberapa pula yang tutup sehingga menjadi Rp. 29.581.601.000,-. Pada tahun 2014 menjadi 3.512.100.000,-.

Iklim investasi di Purbalingga yang semakin kondusif, maka banyak investor yang menanamkan modalnya di Purbalingga. Untuk menarik para investor pemerintah mengupayakan dengan melakukan promosi dan pemasaran potensi daerah, temu bisnis.

c. Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten adalah Rp. 1.023.600,- atau 107,08% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 896.500,-. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah naik rata-rata sebesar 10%/tahun.

Tabel 3.81 Capaian indikator Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten	Rp. 765.000 ,-	67%	Rp. 895.500,-	Rp. 1.023.0 00,-	Rp. 1.023.6 00,-	107,68

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh diupayakan untuk semakin meningkatkan pemenuhan UMK terhadap KHL sesuai dengan komitmen bersama Unsur Tripartit. Berdasarkan survey kebutuhan layak hidup untuk pencapaian tahun 2014 masih jauh dari Kebutuhan Layak Hidup (KLH).

d. Menurunnya angka pengangguran.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2014 adalah 3.906 orang atau 87% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 3.123 dari seluruh penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya investor yang masuk ke Purbalingga dapat membuka

lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia bekerja di Purbalingga. Pada tahun 2013 jumlah perusahaan di Purbalingga bertambah sebanyak 2 perusahaan. Itu berimbas pada pembukaan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja.

Tabel 3.82 Capaian indikator Menurunnya angka pengangguran Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya angka pengangguran	3,82%	30,50%	3.123 orang	4.500 orang	3.906 orang	87%

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 3,82%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 30,50%. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 3.123 orang. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.906 orang. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 4,5%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu empat tahun (2008–2013) cenderung penurunan dari sebesar 7,08% pada tahun 2008 menjadi sebesar 5,72% pada tahun 2013. TPT di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah sebesar 6,02% dan capaian nasional sebesar 6,14%.

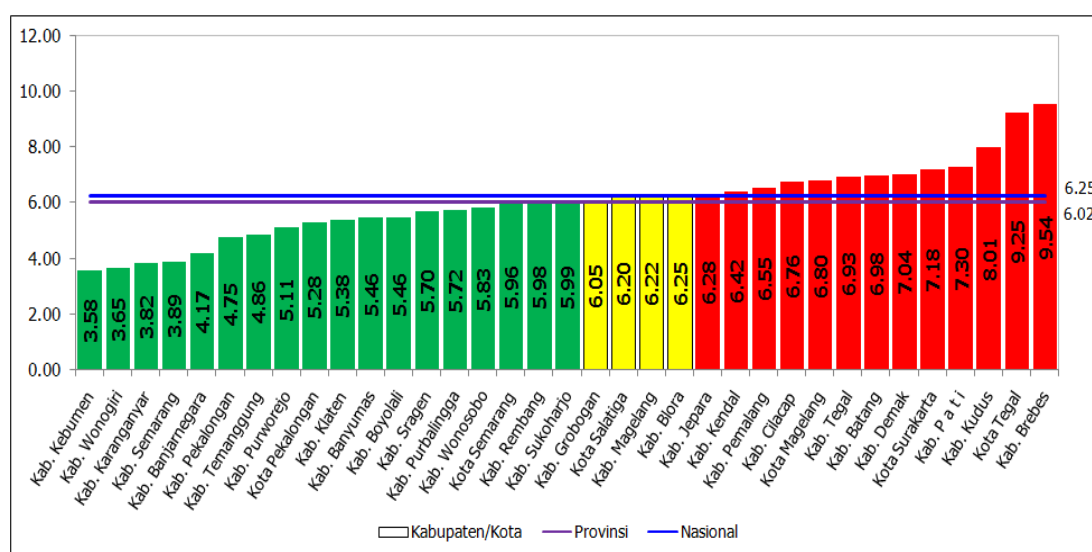
Tabel 3.83
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2008	7,08
2009	4,66
2010	3,82
2011	5,54
2012	5,14
2013	5,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2013

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, TPT di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-14 dari yang terendah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.11 Grafik Peringkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa tengah



**Misi Kelima : Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah,
Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan
Pelayanan Sosial**

Sasaran Kesatu : Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi.

a. Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal.

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal tahun 2014 adalah 703.564 km atau 98,61% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 710.201 km. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 100% jalan di Kabupaten Purbalingga sudah beraspal.

Tabel 3.84 Capaian indikator Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal	96,93%	698,454 (98,345)	700,354 km (98,61%)	703,359 100%	703,564 km (98,61%)	98,61

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 96,93%. Realisasi tahun 2012 menurun menjadi 698.454 km atau 98,345%. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 700.354 km atau 98,61%. Pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu 703,564 km. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 96,5%.

Untuk mencapai target semua jalan sudah beraspal sangat sulit. Itu dikarenakan :

1. Pada APBD murni belum tersedianya dana untuk menangani ruas jalan yang belum teraspal.
2. Harus dilakukan pembangunan jembatan sebanyak 3 unit.
3. Adanya kegiatan yang putus kontrak dan gagal lelang.

b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2014 adalah 515.250 km (72,55%) atau 72,55% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 431.558 km (60,77%). Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 70% dari jumlah panjang jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.85 Capaian indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	44,82%	387,262 (54,52%)	431,558 (60,77%)	521,558 (73,44%)	515,250 (72,55%)	60,77

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 44,82%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 387,262 km atau 54,52%. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 431,558 km atau 60,77%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 515,250 km atau 72,55%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 70%.

Ada beberapa kegiatan pada tahun 2013 yang belum selesai, putus kontrak dan gagal lelang maka pencapaian kinerja tidak mencapai target.

c. Panjang jembatan.

Realisasi capaian indikator kinerja Panjang jembatan tahun 2014 adalah 2.706,8 m atau 98,54% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 2.500,8 m.

Tabel 3.86 Capaian indikator Panjang jembatan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	TARGET 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Panjang jembatan	2.504,8 m	2.542,8 m	2.500,8 m	2.746,8 m	2.706,8 m	98,54

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 2.504,8 m. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 2.542,8 m. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 2.500,8 m, itu dikarenakan ada beberapa jembatan yang dibongkar dan pembangunannya belum selesai pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.706,8 m.

Panjang jembatan yang ada di Purbalingga adalah 2.706,8 m. Letak Kabupaten Purbalingga yang dialiri oleh dua aliran sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga yaitu Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kaja, Sungai lemereng, sungai tlahab, Sungai sosos, Sungai Lebak, sungai tungtung Gunung, Sungai Laban, Sungai Kuning, Sungai Witan, Sungai Ginyung, Sungai Tambra dan Sungai Muli serta sungai yang mengalir disekitar Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sengai Klawing. Jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga sejumlah 271 buah yang terbagi menjadi beberapa kriteria jembatan yaitu baik sekali sepanjang 478,05 m; rusak ringan sepanjang 1.814,30 m; rusak sepanjang 290,70 m dan rusak berat sepanjang 123,75 m. Adanya beberapa pembangunan jembatan baru yang dilakukan pada tahun 2014.

d. Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis tahun 2014 sebanyak 11.232,593 ha beririgasi teknis dan 3.646,251 ha yang setengah teknis atau 100,1% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2014 yaitu sebanyak beririgasi teknis dan setengah teknis tahun 2013 sebanyak 11.232,68 ha beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang setengah teknis. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 3.87 Capaian indikator Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis	3.640,576 ha	11.232,56 ha 3.640,576 ha	11.232,68 ha 3.640,576 ha	11.232,68 ha 3.640,576 ha	11.232,593 ha 3.646,251 ha	100,1

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 3.640,576 ha. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 11.232,56 ha yang beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang beririgasi setengah teknis. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi meningkat menjadi 11.232,68 ha yang beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang beririgasi setengah teknis. Pada tahun 2014 menjadi meningkat menjadi 11.232,593 ha yang beririgasi teknis dan 3.640,576 ha yang beririgasi setengah teknis. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Jaringan irigasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan pertumbuhan pertanian guna mendukung program pemerintah yaitu swasembada pertanian. Pembangunan irigasi yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai saat ini belum maksimal karena masih banyaknya kerusakan yang terjadi pada saluran irigasi baik teknis maupun setengah teknis. Sedangkan perbaikan yang dilakukan masih sangat terbatas. Letak geografis Purbalingga ada beberapa daerahnya yang merupakan pegunungan merupakan daerah mata air juga merupakan salah satu keuntungan bagi purbalingga untuk membuka saluran irigasi baru. Disamping itu juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain penambahan personil untuk mengecek setiap jalur irigasi.

e. Jumlah prasarana pelayanan kesehatan.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah prasarana pelayanan kesehatan tahun 2014 sebanyak PKD 199 unit, Pustu 49 Puskesmas 22 unit atau 97,89% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu

sebanyak PKD 189 unit, Pustu 49 Puskesmas 22 unit. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 3.88 Capaian indikator Jumlah prasarana pelayanan kesehatan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah prasarana pelayanan kesehatan	PKD 177 unit, puskesmas 22 unit	PKD 204 unit, Pustu 48 Puskesmas 22 unit,	PKD 189, Pustu 49, Puskesmas 22 unit	PKD 204, Pustu 49, Puskesmas 22 unit	PKD 199, Pustu 48, Puskesmas 22 unit	97,89

Kondisi sarana pelayanan kesehatan dasar pada saat ini dari 239 desa/ kelurahan dirasa masih kurang. Artinya belum seluruh desa/ kelurahan tersedia sarana pelayanan kesehatan dasar. Perlu dilakukan akselerasi penambahan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dasar di seluruh desa/ kelurahan.

f. Jumlah prasarana pelayanan pendidikan.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah prasarana pelayanan pendidikan tahun 2014 Ruang kelas SD/ MI 5.265, SMP/ MTs 1.458, SMA/SMK/MA 820 ruang kelas atau 104,74 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu Ruang kelas SD/ MI 4.217, SMP/ MTs 1287, SMA/SMK/MA 694 ruang kelas. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.89 Capaian indikator Jumlah prasarana pelayanan pendidikan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah prasarana pelayanan pendidikan	Ruang kelas SD/ MI 4.388, SMP/ MTs 1.267, SMA/SMK/ MA 641 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 4.217, SMP/ MTs 1287, SMA/SMK/ MA 694 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 4477, SMP/ MTs 1398, SMA/SMK/ MA 796 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 4477, SMP/ MTs 1408, SMA/SMK/ MA 805 ruang kelas	Ruang kelas SD/ MI 5.265, SMP/ MTs 1.458, SMA/SMK /MA 820 ruang kelas	104,74

g. Jumlah pasar tradisional.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah pasar tradisional tahun 2014 sebanyak 19 pasar atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 19 pasar. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 36 pasar. Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 hanya merenofasi pasar yang sudah ada dan tidak membangun pasar baru.

Tabel 3.90 Capaian indikator Jumlah pasar tradisional Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah pasar tradisional	34	19	19	19	19	100

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 34 pasar. Realisasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 capaiannya sama yaitu 19 pasar. Itu disebabkan karena yang didata oleh Pemerintah Daerah adalah pasar-pasar yang dikelola oleh pemda saja.

Sasaran Kedua : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman

a. Menurunnya luasan kawasan kumuh.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya luasan kawasan kumuh tahun 2014 tidak ada atau 100% dari target yang ditentukan. Di Purbalingga sudah tidak ada kawasan kumuh. Itu dikarenakan sudah banyaknya bantuan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain PNPM yang diberikan kepada desa/ kelurahan dan Program Usri berupa pembangunan sarana sanitasi berupa IPAL Komunal dengan perpipaan yang bersumber dana dari APBN dengan pendampingan masing-masing SKPD.

Tabel 3.91 Capaian indikator Menurunnya luasan kawasan kumuh Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya luasan kawasan kumuh	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100

b. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni tahun 2014 sebanyak 6% (847 rumah) atau 136,37% dari target yang ditentukan sebanyak 13.858 rumah. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebanyak 4,4% dari jumlah 13.858 rumah. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak tidak ada rumah yang tidak layak huni.

Tabel 3.92 Capaian indikator Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	4,12%	6,98% (turun 1.216)	Menurun 4,4% (13.858)	4,4% turun (13.858)	6% (847)	136,36

Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang merupakan program Kemenpera untuk mendorong Pemda dalam memfasilitasi penyelenggaraan perumahan swadaya serta membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Disamping bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yaitu program PSPR Gakin (Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin) yang digulirkan Pemkab Purbalingga sejak tahun 2003.

c. Meningkatnya rumah tangga bersanitasi.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rumah tangga bersanitasi tahun 2013 adalah 77,31% atau 96,64% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2012 yaitu sebesar 74,89%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 masih lebih rendah dari target akhir RPJMD pada tahun 2015 yaitu 80%.

Tabel 3.93 Capaian indikator Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2013	Capaian %
Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	86%	61,3%	74,89%	80%	77,31%	96,64

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 86%. Realisasi tahun 2012 menurun menjadi 61,3%. Pada tahun 2013 realisasinya meningkat menjadi 74,89%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 80%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 80%.

Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/ tinja)

sudah mulai membaik. Namun jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai akses sanitasi pada tahun 2014 adalah sebesar 77,31%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2014, desa di Kabupaten Purbalingga yang mendapatkan program USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) untuk kawasan perkotaan dan Program Kegiatan Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

d. Meningkatnya rumah tangga menggunakan air bersih

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rumah tangga menggunakan air bersih tahun 2014 sebesar 85,63% atau 85,63% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 99,48%. Capaian pada tahun 2013 belum melampaui target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 90%.

Tabel 3.94 Capaian indikator Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya rumah tangga menggunakan air bersih	80,60%	86,7%	99,48%	100%	85,63	110,53

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 80,60%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 86,70%. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 99,48%. Pada tahun 2014 menurun menjadi 85,63%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah 90%.

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk segala kegiatan mereka. Sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari oleh manusia. Ditinjau dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus

dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas pH, kesadahan dan sebagainya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

Di Kabupaten Purbalingga rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2014 mencapai 85,63%. Ada beberapa program untuk mencapainya diantaranya adalah :

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) pada 8 desa
- 2) Penambahan jaringan pipa air bersih pedesaan
- 3) Adanya program Pamsimas

e. Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya cakupan air bersih tahun 2014 sebesar 40.200 SR atau 103,17 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 44.349 SR. Capaian tahun 2014 belum melampaui target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 43.000 SR.

Tabel 3.95 Capaian indikator Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan	27.825 SR	29.110 SR	44.349 SR	38.962 SR	40.200 SR	103,17

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 27.825 SR. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 29.110 SR. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 44.349 SR. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 40.200 SR.

Jaringan air bersih ini selain dari jaringan PDAM yang melayani air bersih perkotaan tetapi ada juga melalui program kegiatan yang beradi di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang DPU Kabupaten Purbalingga. Program tersebut antara lain

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Program Pamsimas yang melayani air bersih pedesaan.

Bentuk penyediaan air bersih pedesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur bor serta pembangunan brancaptering maupun tower.

f. Meningkatnya cakupan layanan persampahan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya cakupan layanan persampahan tahun 2014 adalah 160 m³ /hr 262 m³ /hr atau 103,40% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 152,50 m³/hr 194,90 m³/hr.

Tabel 3.96 Capaian indikator Meningkatnya cakupan layanan persampahan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya cakupan layanan persampahan	150,2 m ³ /hr	152 m ³ /hr	152,50 m ³ /hr	154 m ³ /hr	160 m ³ /hr	103,40
	193,48 m ³ /hr	193,48 m ³ /hr	194,90 m ³ /hr	195,63 m ³ /hr	262 m ³ /hr	

Volume sampah yang ditangani oleh DKP adalah 160 m³/hr. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga melayani 10 Kecamatan yang ada disekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat maka jumlah sampah yang akan dilayani semakin banyak.

g. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

Realisasi capaian indikator kinerja Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk tahun 2014 adalah 0,17 m³/penduduk atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih kecil dengan capaian tahun 2012 yaitu sebesar 0,16 m³/penduduk.

Tabel 3.97 Capaian indikator Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,26 m ³ /penduduk	0,16 m ³ /penduduk	0,16 m ³ /penduduk	0,17 m ³ /penduduk	100

Sampah merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi setiap manusia. Jumlah sampah yang semakin hari semakin bertambah mengakibatkan perlunya pengelolaan yang baik untuk mencegah jumlah sampah yang tidak sangat banyak sementara itu tempat pembuangan sampah setiap tahunnya akan mengalami penurunan karena belum adanya penambahan tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, akan mempengaruhi jumlah penampungan sampah.

Sasaran Ketiga : Terpenuhi pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi.

a. Meningkatnya rasio elektrifikasi.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2014 adalah 82,70% atau 84% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 98,41%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 diharapkan akan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.98 Capaian indikator Meningkatnya rasio elektrifikasi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya rasio elektrifikasi	98,30%	98,40%	98,41%	98,45%	82,70%	84

Pada tahun 2011 realisasinya adalah 98,30%. Realisasi tahun 2012 meningkat menjadi 98,40%. Pada tahun 2013 realisasinya menjadi 98,41. Pada tahun 2014 menurun menjadi 82,70%. Target akhir yang ditetapkan RPJMD adalah meningkat.

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada. Berdasarkan hasil survei tahun 2010 oleh Konsultan Penyusun Rencana Umum Pengelolaan Energi Daerah (RUPED), rasio elektrifikasi tahun 2010 adalah sebesar 98,30% dengan asumsi bahwa rumah tangga dianggap berlistrik bila sudah menikmati energi listrik walaupun tidak mempunyai KWH meter sendiri. Dengan adanya Listrik masuk desa baik yang didanai oleh APBN (oleh PLN), APBD Provinsi (Dinas ESDM Prov) dan APBD Kabupaten (Didang ESDM, DPU), jaringan listrik semakin bertambah dan jumlah sambungan baru semakin bertambah, sehingga jumlah rumah tangga berlistrik semakin meningkat dan Rasio Elektrifikasinya meningkat. Target pada tahun 2014 adalah sebesar 98,45% namun capaian tahun 2014 sebesar 82,70%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan asumsi dalam perhitungannya. Sebelumnya jumlah rumah tangga berlistrik dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berlistrik walaupun belum memiliki meteran sendiri. Paada tahun 2014, jumlah rumah tangga yang berlistrik dihitung hanya yang sudah mempunyai meteran sendiri.

b. Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar.

Tabel 3.99 Capaian indikator Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar	Menurun	Menurun	Tidak ada	Menurun	menurun	100

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar tahun 2014 adalah tidak ada atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu tidak ada. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 tidak ada penduduk yang menggunakan kayu bakar.

Data pengguna kayu bakar secara real tidak ada. Namun dengan asumsi meningkatnya penggunaan elpiji 3 kg, maka pengguna kayu bakar semakin berkurang. Saat ini terdapat 2 SPBE yang memasok 7 agen elpiji 3 kg yang ada di Purbalingga yaitu :

- 1) SPBE yang ada di Purbalingga
 - PT. Indo Marketing World, Bojongsari;
 - PT. Serayu Gas Abadi, Bukateja.
- 2) Agen Elpiji 3 kg yang ada di Purbalingga
 - PT. Asrikin Putra Perkasa, Purbalingga
 - PT. Asri Jaya Raharja, Purbalingga
 - PT. Sri Wijaya Indah, Kalimanah
 - PT. Setyo Mulyo Santosa, Purbalingga
 - PT. Bumi Margo Mulyo, Kemangkong
 - PT. Jasa Migas Sejahtera, Kaligondang
 - PT. Energi mitra Tama Abadi, Bobotsari

Pemakaian elpiji 3 kg dikabupaten Purbalingga pada Tahun 2014 mencapai angka 14.435 tabung/ hari. Permintaan kuota elpiji 3 kg ke PT. Pertamina Persero pada tahun 2013 sebanyak 13.500 tabung/ hari menjadi 18.148 tabung/ hari pada tahun 2014, serta ditunjang dengan pengawasan dan pengendalian distribusi elpiji 3 kg.

Sasaran Keempat : Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.

a. Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi tahun 2014 adalah 35 desa atau 65% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2012 yaitu tidak ada. Target akhir

yang ditetapkan pada tahun 2015 tidak ada desa yang tidak terjangkau layanan komunikasi.

Tabel 3.100 Capaian indikator Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi	0	0	0	0	2	65

Telekomunikasi merupakan kebutuhan bagi setiap penduduk untuk mengetahui kondisi disekitar lingkungannya. Kondisi geografis di Purbalingga yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan sangat sulit untuk pemeratakan jaringan telekomunikasi. Ada beberapa kecamatan yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel dari Telkom, dan belum terjangkau oleh jaringan telepon selular. Pemerintah saat ini sudah mengupayakan pendataan akses telekomunikasi dan internet masuk desa di seluruh kecamatan-kecamatan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring warnet.

b. Jumlah warung internet.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah warung internet tahun 2014 adalah 104 atau 98,11% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu tidak ada.

Tabel 3.101 Capaian indikator Jumlah warung internet Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi	84	106	106	106	104	99,11

Dengan semakin mudahnya mengakses internet maka perkembangan warung internet yang ada semakin memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan

sepinya pengunjung di beberapa warung internet sehingga banyak warung internet yang tutup. Melalui kegiatan monitoring warnet dapat diketahui bahwa pada saat ini jumlah warnet semakin menurun/ sedikit, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih mengakses internet melalui *gadget* yang aplikasinya semakin canggih dan mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi melalui internet dan harganya semakin terjangkau oleh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan sosialisasi internet sehat melalui kegiatan monitoring dan pembinaan serta pembuatan poster pengguna internet sehat sesuai UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Jumlah hot spot area.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah hot spot area tahun 2014 adalah 16 atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu 13. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 meningkat.

Tabel 3.102 Capaian indikator Jumlah hot spot area Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah hot spot area	6	8	13	16	16	100

Tingginya kebutuhan akan informasi pada saat ini memang sangat tinggi. Terutama anak muda yang selalu menjadikan media sosial digunakan untuk berhubungan dengan para sahabatnya.

d. Jumlah jenis pelayanan publik secara online

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah jenis pelayanan publik secara online tahun 2014 adalah 27 (1 Website Purbalingga, 24 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE) atau 93,10% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dibandingkan capaian tahun 2012 yaitu 25. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 meningkat.

Upaya untuk mengelola Sub Domain dengan pelatihan update website, namun pada prakteknya ada beberapa SKPD yang tidak aktif mengakses karena keterbatasan personil.

Tabel 3.103 Capaian indikator Jumlah jenis pelayanan publik secara online Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2013	Realisasi 2012	TARGET 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah jenis pelayanan publik secara online	3	25 (1 Website Purbalingga, 22 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE)	25	29 (1 Website Purbalingga, 26 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE)	27 (1 Website Purbalingga, 24 sub domain, 1 sistem surat elektronik, LPSE)	93,10

e. Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika tahun 2014 adalah 100% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dibandingkan capaian tahun 2013 yaitu 100%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 meningkat.

SKPD di Kabupaten Purbalingga sudah menggunakan teknologi informatika pada pelaksanaan administrasi sehari-hari. Ada beberapa SKPD yang sudah menggunakan aplikasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tabel 3.104 Capaian indikator Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100

Misi Keenam : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati.

Sasaran Kesatu : Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat

a. Menurunnya luas lahan kritis.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya luas lahan kritis pada kawasan lindung tahun 2014 adalah 4,71% atau 94,2% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 7%. Luas lahan kritis diluar kawasan hutan di Purbalingga untuk fungsi hutan lindung agak kritis seluas 6.353,2 Ha dan yang kritis seluas 887,3 Ha. Rehabilitasi hutan dikawasan hutan lindung dengan pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) dan penanaman pohon untuk konservasi yang bersumber dari DAS Serayu Opak Progo Yogyakarta.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya luas lahan kritis pada kawasan budidaya pertanian tahun 2014 adalah 4,71% atau 94,2% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu 17%. Rehabilitasi hutan dikawasan budidaya dengan pembangunan sipil teknis (cek dam/ dam penahan, guly plug, sumur resapan) dan penanaman pohon (tanaman yang berfungsi untuk konservasi dan menghasilkan buah) dikawasan budidaya.

Tabel 3.105 Capaian indikator Menurunnya luas lahan kritis Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya luas lahan kritis						
▪ Persentase lahan kritis di kawasan lindung	4%	7,66%	7%	5%	4,71%	94,2
▪ Presentase Lahan kritis di kawasan budidaya pertanian	1%	21,34%	17%	5%	4,71%	94,2

b. Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah.

Tabel 3.106 Capaian indikator Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah	Dibawah ambang batas	Dibawah ambang batas (50%)	Udara : 8/8 Air : 36/45 Tanah : 0	Udara : 100% Air : 100% Tanah : 0	Udara : 10/10 Air : 20/20 Tanah : 0	100%

1) Upaya Penurunan Pencemaran Udara

Keberadaan Industrialisasi di Kabupaten Purbalingga berpengaruh besar terhadap kondisi kualitas udara. Udara merupakan komponen lingkungan penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan penggunaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang ataupun pembatas tertentu, karena sebarannya tidak bisa dibatasi dan penggunaannya adalah penting terkait dengan unsur kehidupan semua makhluk hidup. Untuk itu, menjaga kualitas udara menjadi

suatu kebutuhan agar masyarakat dan makhluk hidup lainnya tidak terganggu kesehatannya akibat udara yang tercemar. Pentingnya udara yang sehat tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan kualitas udara. Dalam hal ini adalah uji udara ambien pada wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan pusat kegiatan bagi penduduknya.

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak pencemaran udara yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku industri dengan pengukuran beberapa parameter. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Lokasi Pengambilan sampel adalah beberapa industri di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan sebaran yang memungkinkan untuk dilaksanakan pemantauan kualitas udara, karena isu lingkungan merupakan suatu hal yang riskan, maka tidak semua industri membuka diri untuk dilakukan pengambilan sampel uji emisi. Lokasi industri / obyek pemantauan yang ditetapkan untuk dilakukan uji emisi adalah :

- a) Industri Mie Soun, PT. Kuda Terbang;
- b) Industri Tapioka, PT. Sari Bumi Karya;
- c) Industri Pengolahan Kayu, PT. Majapura;
- d) Industri Pengolahan Kayu, PT. Bima Nugraha;
- e) Industri Pengolahan Kayu, PT. Karya Bhakti Manunggal;
- f) Industri Minyak Kelapa, CV. Dua Naga;
- g) Industri Pengolahan Kayu, PT. Wana Makmur Sejahtera;
- h) Industri Pengolahan Kayu dan Bengkel Bubut, CV. Men Jaya;
- i) Industri Pengolahan Kayu, CV. Purbayasa (utara);
- j) Industri Pengolahan Kayu, CV. Purbayasa (selatan).

Pengambilan sampel dan uji kualitas udara dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP), Yogyakarta. Data yang didapat sebagai hasil pengujian / pengukuran di

lapangan dianalisis dengan dikomparasikan pada Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BBTCL PP, Yogyakarta terhadap objek pemantauan tersebut menunjukkan adanya beberapa parameter yang melampaui kadar maksimal yang dipersyaratkan. Merujuk hasil uji tersebut, pemerintah kabupaten, melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan lebih lanjut kepada penanggung jawab kegiatan usaha/industri dengan memberikan rekomendasi untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran udara, antara lain melalui aspek operasional administrasi lingkungan rutin, aspek teknis untuk memperbaiki kualitas udara emisi.

Pada tahun 2014 realisasi target capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber Tidak Bergerak adalah 100 %. Terdapat 10 perusahaan yang dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, sedangkan target pengawasannya adalah 10 perusahaan. Perhitungannya adalah $(10/10) \times 100\%$

2) Upaya Penurunan Pencemaran Air.

Perkembangan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya sektor industri menyebabkan terjadinya peningkatan polusi pada badan air yang banyak dijadikan areal pembuangan limbah, baik industri kecil maupun industri berskala menengah ke atas. Hal inilah yang menjadikan perlunya dilakukan tindakan pemantauan secara rutin. Pemantauan bisa dilaksanakan oleh instansi terkait yang dibantu oleh semua lapisan masyarakat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran pada badan air yang nantinya dapat berdampak serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Jika terjadi pencemaran sebagaimana dimaksud maka pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.

Pengelolaan sumber daya air membutuhkan pendekatan yang holistik, berdasarkan partisipatori yang melibatkan pengguna, perencana, dan penentu kebijakan mengingat air dalam keadaan tertentu sudah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan holistik sumberdaya air dengan titik tolak pemikiran bahwa air sebagai sumberdaya alam yang rentan dan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, benda sosial yang sekaligus mempunyai nilai ekonomi. Penetapan alokasi air hendaknya menerapkan pengelolaan permintaan, mekanisme harga dan pelaksanaan pengaturan dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor.

Perkembangan investasi dan industri yang begitu menyolok berdampak pada perubahan lingkungan, terutama lingkungan perairan yang banyak digunakan sebagai areal pembuangan limbah. Sektor industri memiliki kecenderungan terus berkembang, sehingga pada masa mendatang dimungkinkan akan dapat menjadi sektor basis. Perkembangan ini sangat luar biasa dan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Dibalik dampak positif pada perekonomian yang besar ini, dampak negatif juga mengancam wilayah Purbalingga. Longgarnya perijinan diikuti dengan longgarnya penegakan hukum yang ada. Banyak kegiatan usaha/ industri, bahkan yang berskala besar sekalipun yang tidak memiliki IPAL, AMDAL, UKL-UPL dan prosedur lingkungan lainnya, padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Limbah Cair di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak limbah cair yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha/industri dengan menggunakan beberapa parameter fisika dan kimia. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Limbah Cair ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan terutama lingkungan perairan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Lokasi kegiatan yang menjadi objek pemantauan meliputi 20 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga. Ke-20 lokasi pemantauan tersebut yaitu : 1) Industri Soun dan Tapioka (5 titik pantau); 2) Industri Bulu

Mata dan Rambut Palsu (4 titik); 3) Kegiatan Peternakan (4 titik); 4) Kegiatan Rumah Sakit (3 titik); 5) Industri Kayu dan Hotel (4 titik).

Lokasi pengambilan contoh air/limbah cair yang digunakan dalam kegiatan pemantauan ini adalah limbah yang keluar dari lokasi industri tepat sebelum memasuki lingkungan / badan air. Parameter dan metode analisis contoh air/limbah cair yang digunakan dalam kegiatan pemantauan ini mengacu pada Baku Mutu berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas III.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP), Yogyakarta terhadap kelompok objek pemantauan tersebut menunjukkan adanya beberapa parameter fisik dan kimia yang melampaui kadar maksimal yang dipersyaratkan. Merujuk hasil uji tersebut, pemerintah kabupaten, melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan lebih lanjut kepada penanggung jawab kegiatan usaha/industri dengan memberikan rekomendasi untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran air, antara lain melalui: aspek dokumentasi lingkungan dan administrasi perizinan, aspek operasional administrasi lingkungan rutin, aspek teknis pengelolaan limbah.

Pada tahun 2014 target Kabupaten Purbalingga untuk jenis pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Kabupaten Purbalingga adalah 50%. Sementara untuk capaian realisasinya adalah 100%. Terdapat 20 kegiatan usaha / industri yang dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, sedangkan target pengawasannya adalah 20 kegiatan usaha / industri. Perhitungan realisasinya adalah $(20/20) \times 100\%$.

3) Upaya Pencegahan Pencemaran Tanah

Pengujian terhadap tanah untuk produksi biomassa belum bisa dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disebabkan infrastruktur dan SDM pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga belum

memiliki kapasitas untuk melakukan penyusunan peta status kerusakan tanah secara mandiri. Sementara, apabila diserahkan kepada konsultan untuk melakukan pekerjaan ini, biaya yang harus dialokasikan cukup besar.

Sasaran Kedua : Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.

a. Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index).

Realisasi capaian indikator kinerja Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index) tahun 2014 sebesar 100% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Ini dapat dicapai dengan menjaga keragaman hayati baik yang ada di hutan Negara maupun dilahan masyarakat dengan pelaksanaan program perlindungan sumber daya alam.

Tabel 3.107 Capaian indikator Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Terjaganya keragaman hayati (biodiversity index)	100%	100%	100%	100%	100%	100

b. Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup.

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup tahun 2014 sebesar 11 kasus dan diselesaikan semuanya atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah menurun tiap tahunnya.

Tabel 3.108 Capaian indikator Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup	100%	100%	6/6 (100%)	100%	11/11 (100%)	100%

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah Kabupaten Purbalingga, baik berupa Perda mengenai pengelolaan lingkungan, maupun penegakan hukum yang lebih tinggi, yaitu dari provinsi ataupun undang-undang dan peraturan dari pusat mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk dapat menegakkan hukum lingkungan diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan penegak hukum / instansi yang bertanggung jawab dengan persoalan lingkungan pada waktu yang akan datang. Hal ini terjadi karena tanpa adanya aduan masalah lingkungan dari masyarakat, pemerintah tidak akan mengetahui dengan jelas persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terutama yang menimpa masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat.

Beberapa masalah lingkungan yang ditangani oleh pemerintah daerah sampai saat ini lebih banyak yang bersifat rutinitas, seperti gerakan penghijauan dan reboisasi terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan di sekitar kawasan lindung, sedangkan permasalahan mengenai pelanggaran hukum lingkungan atau pencemaran lingkungan tidak begitu banyak ditangani karena memang sifatnya bukan berupa aduan, sehingga tanpa aduan dari masyarakat penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam hal ini masyarakat juga berperan sebagai kontrol dalam penegakan hukum.

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan, membuat masyarakat berontak dan mengadukan masalah yang terjadi terkait dengan ketidaknyamanan akan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka akibat adanya berbagai kegiatan usaha. Pada tahun 2014 terdapat 11 masalah lingkungan yang diadukan oleh masyarakat ke pemerintah kabupaten, Cq. Badan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan yang diadukan adalah pencemaran

udara, limbah cair, kebisingan, dan bau yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha. Di tahun 2014, target Kabupaten Purbalingga untuk jenis pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah 100%. Terdapat 11 pengaduan, dan realisasinya terdapat 11 pengaduan permasalahan lingkungan yang ditindaklanjuti. Persentase perhitungannya adalah $(11/11) \times 100\%$.

Sasaran Ketiga : Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

a. Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL).

Realisasi capaian indikator kinerja Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL) tahun 2014 adalah Amdal : 0 UKL/ UPL : 7 SPPL : 116 atau 100% dari target yang ditentukan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.109 Capaian indikator Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL) Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)	Amdal : 2 (100%) UKL/UPL : 75	Amdal : 2 (100%) UKL/UPL : 20 (100%)	Amdal : 0 UKL/UPL : 19 SPPL : 64	100%	Amdal : 0 UKL/ UPL : 7 SPPL : 116	100

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Berbagai jenis usaha, baik industri besar maupun kecil yang berkembang di Kabupaten Purbalingga perlu untuk dimonitor dan diawasi dari mulai pembangunan sampai dengan proses produksinya. Untuk itulah, maka setiap jenis usaha / industri dengan skala tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diwajibkan untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Untuk AMDAL pada tahun 2014 tidak ada kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, sehingga tidak ada rekomendasi AMDAL yang diterbitkan, sedangkan untuk UKL-UPL telah diterbitkan sebanyak 7 rekomendasi, dan SPPL sebanyak 116 rekomendasi. Salah satu tujuan dari rekomendasi penyusunan dokumen lingkungan ini adalah untuk mengetahui ketaatan pemilik kegiatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL maupun SPPL.

b. Meningkatnya kelompok peduli lingkungan.

Realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kelompok peduli lingkungan tahun 2014 sebesar 16 Kelompok atau 114,8% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu 13 Organisasi. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah meningkat tiap tahunnya.

Tabel 3.110 Capaian indikator Meningkatnya kelompok peduli lingkungan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Meningkatnya kelompok peduli lingkungan	5	3 LSM	13 Organisasi	14 Kelompok	16 Kelompok	130

Baik tidaknya kondisi lingkungan/persoalan lingkungan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama dari mulai masyarakat hingga sampai ke pemerintah. Peran serta masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kualitas

lingkungan sebenarnya sangat besar, karena masyarakat itu sendirilah yang nantinya akan langsung merasakan akibat dari adanya perubahan-perubahan lingkungan. Beberapa kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan sudah mulai tumbuh di Kabupaten Purbalingga, sehingga nantinya dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi sebelum diteruskan ke pemerintah daerah.

Selain itu, keberadaan kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan nantinya diharapkan dapat berperan aktif sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai kebijakan dan program terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2014 ada 16 kelompok peduli lingkungan terdiri dari 10 bank sampah, yaitu Bank Sampah di Kelurahan Purbalingga Lor, Purbalingga Kidul, Purbalingga Wetan, Bancar, Kembaran Kulon, Wirasana, Penambongan, Bojong, Desa Sumampir, Karangbanjar, 3 LSM, yaitu LSM Mahardika, LSM Hidup, LSM Sarana Wana Lestari, dan Forum Purbalingga Bersih, Komunitas Hijau dan kelompok siswa pecinta alam. Kurangnya penghargaan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang diterima oleh masyarakat Purbalingga merupakan salah satu indikator dari rendahnya peranan masyarakat dalam mengelola dan merawat lingkungan. Untuk itulah, pemerintah daerah mencoba untuk menyelenggarakan penyuluhan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan nantinya peningkatan timbulan sampah yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat dapat ditanggulangi sejak dini.

c. Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin tahun 2014 adalah Menurun 2,10% dari luas lahan 25,65 ha atau 110,93% dari target yang ditentukan. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 tidak adanya kasus pertambangan liar di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.111 Capaian indikator Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya penggalian tambang tanpa ijin	Menurun	Menurun	Menurun 2,9% (25,65 ha)	Menurun 3,13% Dari luas 25,65ha	Menurun 2,10% (23,55 ha)	107,93

Masih tingginya angka penambangan liar di Purbalingga karena Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga belum bisa menerbitkan Ijin Usaha pertambangan (IUP) baru terkait masalah regulasi dan adanya Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI No. 08.E/30/DJB/ 2012 tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP baru sampai ditetapkan wilayah pertambangan. Ditingkat nasional, dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka per tanggal 2 Oktober 2014 semua perijinan terkait pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu. Ditangkt Kabupaten, Peraturan Bupati tentang Tata Cara Memeperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagai tindak lanjut Perda Kabupaten Purbalingga No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan Miniral dan retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan yang belum efektif berjalan dan dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka Perda dan perbub tersebut sudah tidak berlaku lagi.

d. Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan.

Realisasi capaian indikator kinerja Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan tahun 2014 sebesar 100% atau 100% dari target yang ditentukan. Capaian tersebut menurun dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah tidak ada kasus.

Tabel 3.112 Capaian indikator Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2011	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian %
Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan	Menurun	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.113 Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Tahun 2014.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	
		Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	102,46	Sangat Baik
2	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien, serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.	72,22	Baik
3	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.	97,01	Sangat Baik
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam	118,86	Sangat

	kehidupan masyarakat di segala bidang		baik
5	Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM).	103,65	Sangat Baik
6	Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan.	100	Sangat Baik
7	Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	100	Sangat Baik
8	Meningkatnya kualitas manusia secara umum	100,04	Sangat Baik
9	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.	95,53	Sangat Baik
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	80,82	Baik
11	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	98,25	Sangat Baik
12	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	97,45	Sangat Baik
13	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga	82,79	Sangat Baik
14	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang	128,18	Sangat baik

	sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.		
15	Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga	96	Sangat Baik
16	Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan	100	Sangat Baik
17	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.	108,78	Sangat Baik
18	Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.	88,72	Sangat Baik
19	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.	80,39	Baik
20	Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan	85,59	Baik

	ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan		
21	Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi	94,44	Sangat baik
22	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	107.16	Sangat Baik
23	Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi	92	Sangat berhasil
24	Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.	91,44	Sangat Baik
25	Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat	97,1	Baik
26	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.	100	Sangat Baik
27	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.	109,48	Sangat Baik
		2.628,36 / 27 = 97.35	Sangat Baik

Tabel 3.114 Matrik Capaian Kinerja

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
100,054	100,09	100,70	94.93	97,35

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dengan anggaran sebesar Rp 1.446.567.532.000,- (Satu trilyu empat ratus empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) mengkomodir program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2014 dengan mengedepankan skala prioritas, efisiensi dan efektifitas penggunaan input/ sumber daya.

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini yang dikelompokkan menurut sasaran strategis yang hendak diwujudkan dan program yang dilaksanakan.

Tabel 3.115 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2014

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	3.489.412.000	3.006.806.219	86,17%
Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal	2.617.692.000	2.211.753.293	84,49%
Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam	86.731.165.000	77.044.880.851	88,83%

penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia			
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang	1.884.375.000	1.855.725.905	98,48%
Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM)	135.326.000	126.673.900	93,61%
Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan	12.666.803.000	12.179.210.900	95,15%
Ter Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan	15.912.287.000	10.663.090.352	67,01%

fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.			
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga	1.984.794.000	1.976.348.000	99,57%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	119.707.279.000	102.862.291.723	85,93%
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	74.994.610.000	54.852.201.975	73,14%
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	693.350.000	679.995.100	98,07%
Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga	3.203.135.000	2.587.087.534	80,77%
Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan	13.141.348.000	8.819.830.426	67,12%

dinamika dalam kehidupan sosial			
Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga	1.871.929.000	1.769.714.000	94,54%
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga	1.806.400.000	1.796.634.619	99,46%
Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	821.535.000	746.105.884	90,82%
Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi	32.319.046.000	28.624.025.217	88,57%

Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan	251.814.000	245.976.700	97,68%
Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi	171.322.176.000	150.544.968.240	87,87%
Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	13.967.252.000	12.994.400.597	93,03%
Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi	3.050.386.000	2.563.826.850	84,05%
Terselenggaranya Pelayanan Telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi	6.512.268.000	3.866.017.056	59,37%
Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat	1.825.768.000	1.800.120.470	98,60%
Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam	676.796.000	670.481.850	99,07%

Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	4.464.134.000	3.938.209.850	88,22%
--	---------------	---------------	--------

BAB IV

P E N U T U P

Komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mencapai visi *Purbalingga Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berakhlak Mulia*, sebagaimana gambaran tingkat pencapaian sasaran dari hasil analisis dan pengukuran akuntabilitas kinerja tahun 2014 yang telah diuraikan dalam Bab III, melalui berbagai program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015, secara umum telah diperoleh nilai sangat baik yaitu 97.35%.

Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang ingin diwujudkan, telah diperoleh hasil pencapaian sasaran dengan kategori sangat berhasil sejumlah 20 (dua puluh) sasaran, dan yang memperoleh capaian kinerja dalam kategori berhasil sebanyak 7 (tujuh) sasaran.

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Kualitas penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik belum seperti yang diharapkan serta ketersediaan SDM aparatur yang terbatas.
2. Menurunnya angka partisipasi sekolah yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan.
3. Laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi.
4. Meningkatnya angka pengangguran sejalan dengan meledaknya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja.
5. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya, yaitu :

- 1) Mengatasi permasalahan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih relatif rendah (tuntutan *good governance*) terhadap penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik serta ketersediaan SDM aparatur yang terbatas pertama, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah :
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, kualitas sistem pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

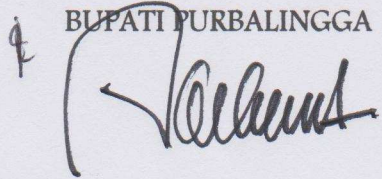
- b. Penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Penguatan kualitas administrasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui pengembangan sistem pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur
 - d. Penguatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
 - e. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas, dan peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan reward and punishment.
- 2) Mengatasi permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.
- 3) Mengatasi permasalahan meningkatnya angka pengangguran sejalan dengan meledaknya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja adalah peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial serta pelayanan perijinan yang berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investor.
- 4) Mengatasi permasalahan kemiskinan, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah :
- a. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menitikberatkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan *updating* data PMKS, serta sistem penanganan PMKS.
 - b. Peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta mendorong berkembangnya UMKM.
 - c. Fasilitasi penyediaan permukiman yang layak huni.

Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk:

1. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai strategi dan arah kebijakan yang digariskan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam rangka pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia secara maksimal.
5. Dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan guna mengarahkan pada pencapaian sasaran dan tujuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana yang diharapkan.

Purbalingga, 30 Maret 2015



BUPATI PURBALINGGA

Drs. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO, MM